



**ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DAN DAYA SAING  
TANAMAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Jessica Felita Pramono**

**NIM 150810101165**

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DAN DAYA SAING  
TANAMAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana

Oleh:

**Jessica Felita Pramono**

**NIM 150810101165**

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

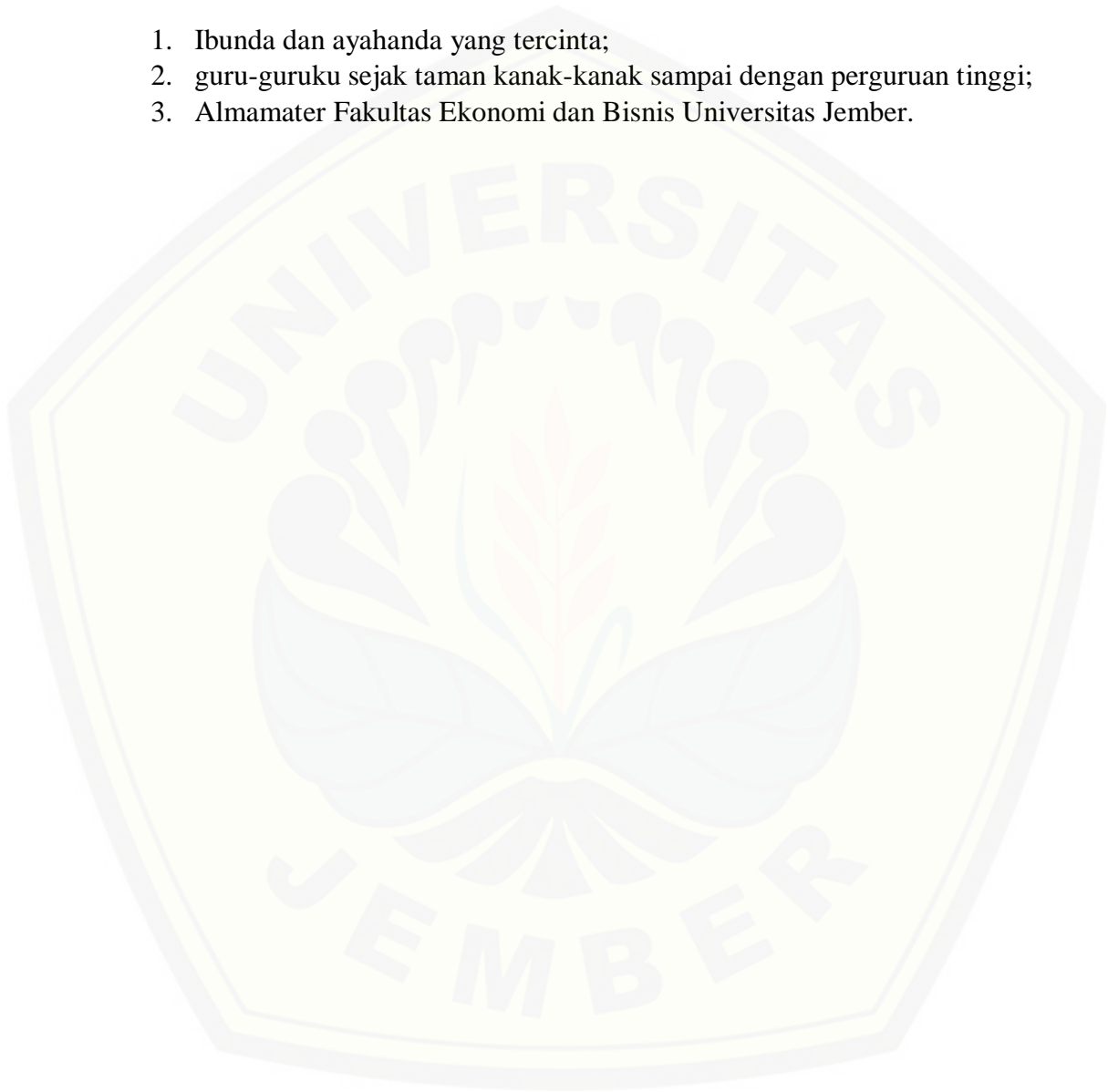
**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

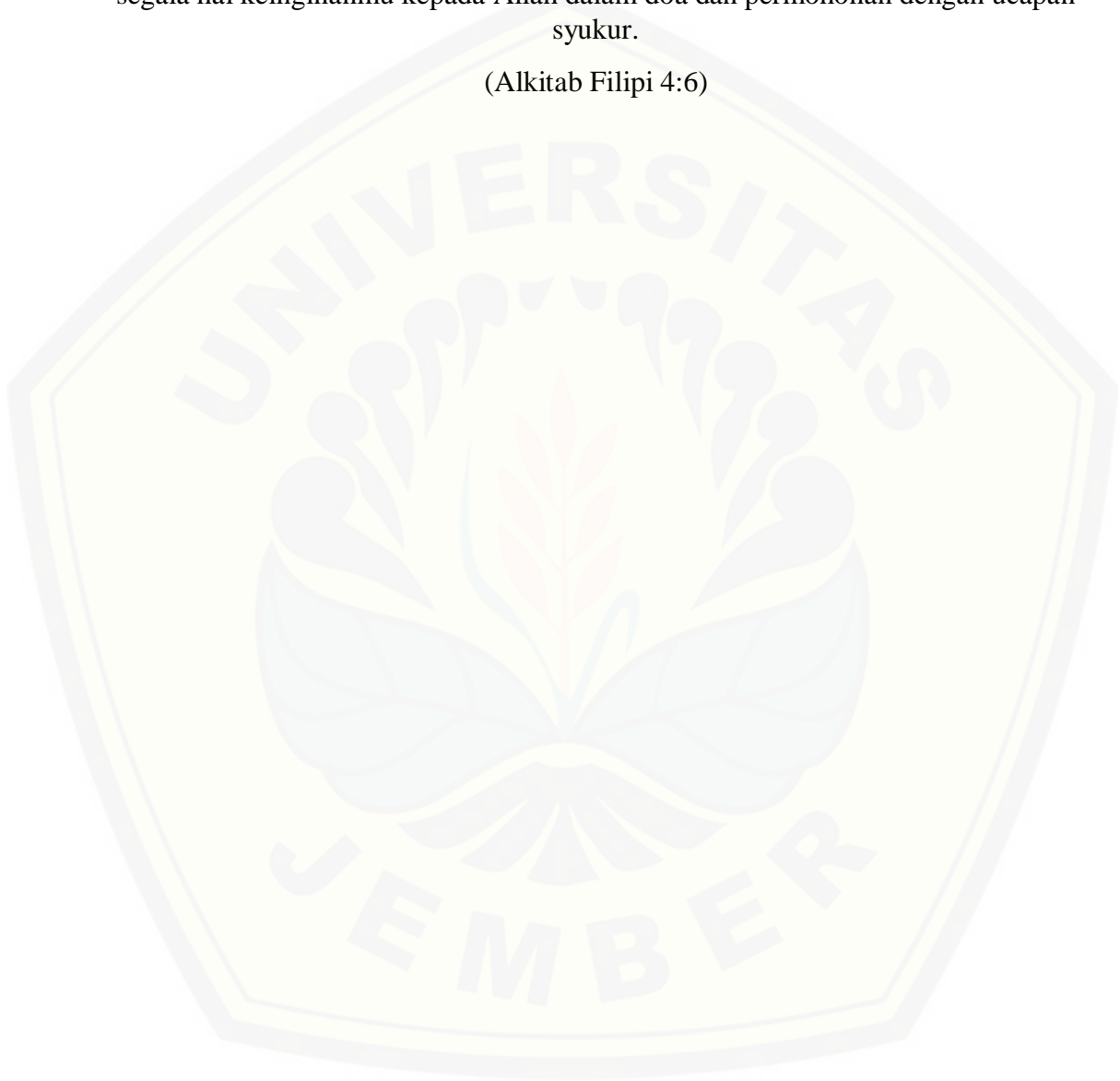
1. Ibunda dan ayahanda yang tercinta;
2. guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



**MOTO**

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

(Alkitab Filipi 4:6)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Jessica Felita Pramono

NIM : 150810101165

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “*Analisis Sektor Potensial Dan Daya Saing Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Jember*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Februari 2019

Yang menyatakan,

Jessica Felita Pramono

NIM 150810101165

**SKRIPSI**

**ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DAN DAYA SAING  
TANAMAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

Jessica Felita Pramono

NIM 150810101165

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E,M.P

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Sektor Potensial Dan Daya Saing Tanaman  
Perkebunan Di Kabupaten Jember  
Nama : Jessica Felita Pramono  
Nim : 150810101165  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Regional  
Tanggal Persetujuan : 12 Februari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E.,M.P

NIP. 197207131999031001

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si

NIP. 196306141990021001

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.

NIP. 196411081989022001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DAN DAYA SAING  
TANAMAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Jessica Felita Pramono

NIM : 150810101165

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

22 Maret 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dra. Anifatul Hanim, M.Si (.....)  
NIP. 196507301991032001
2. Sekretaris : Dr. Siti Komariyah, S.E.M.Si (.....)  
NIP. 197106102001122002
3. Anggota : Dr. Moh. Adenan, M.M (.....)  
NIP. 196610311992031001

Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak,CA.

NIP. 197107271995121001



**Jessica Felita Pramono**

*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas  
Jember*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor yang termasuk dalam sektor potensial di Kabupaten Jember, mengetahui daya saing sektoral potensial dalam perdagangan antar daerah di Kabupaten Jember dan mengetahui kebijakan yang mendukung daya saing sektor potensial dalam perdagangan antar daerah di Kabupaten Jember.

Metode analisis data yang digunakan adalah *Dynamic Location Quotient* (DLQ) untuk mengetahui sektor mana di masa yang akan datang lebih memiliki potensi lebih tinggi, *Revealed Comparative Advantage* (RCA) untuk mengetahui tingkat daya saing, dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan strategi atau kebijakan.

Hasil penelitian berdasarkan metode analisis DLQ terdapat empat sub sektor di masa yang akan datang memiliki potensi, yaitu: sub sektor tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, jasa pertanian dan perburuan serta sub sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan metode analisis RCA komoditi di Kabupaten Jember yang memiliki daya saing kuat adalah tembakau dengan nilai RCA 5,45. Berdasarkan metode AHP alternatif yang memiliki nilai prioritas paling tinggi adalah kebijakan kerja sama antar daerah dengan nilai 0,829516.

**Kata Kunci:** Subsektor, sektor basis, perdagangan antar daerah, kerja sama antar daerah.

**Jessica Felita Pramono**

*Department of Development Economics, Faculty of Economics and Business,  
University of Jember*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the sectors included in the potential sector in Jember Regency, to know potential sectoral competitiveness in inter-regional trade in Jember Regency and to know policies that support the competitiveness of potential sectors in inter-regional trade in Jember Regency.*

*The data analysis method used is Dynamic Location Quotient (DLQ) to find out which sectors in the future have more potential, Revealed Comparative Advantage (RCA) to determine the level of competitiveness, and Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine strategies or Policy.*

*The results of the study based on the DLQ analysis method have four potential sub-sectors in the future, namely: horticulture crops sub-sector, plantation crops, agricultural services and hunting and mining and quarrying sub-sectors. Based on the RCA analysis method of commodities in Jember Regency which has strong competitiveness is tobacco with an RCA value of 5.45. Based on the alternative AHP method which has the highest priority value is the cooperation policy between regions with a value of 0.829516.*

**Keywords:** *Subsector, base sector, trade between regions, cooperation between regions.*

## RINGKASAN

**Analisis Sektor Potensial dan Daya Saing Tanaman Perkebunan di Kabupten Jember;** Jessica Felita Pramono; 150810101165; 2019: 120 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Jember.

Pemerataan pertumbuhan ekonomi secara nasional perlu adanya peningkatan pembangunan ekonomi daerah. Daerah memerlukan wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yaitu wewenang otonomi daerah. Otonomi daerah membantu pemerintah daerah dapat secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang. Adanya otonomi daerah maka daerah dapat mengolah sumber daya alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dialokasikan ke perdagangan antar daerah. Pengalokasian sumber daya alam yang memiliki potensi tersebut maka akan membantu sumber daya alam tersebut meningkatkan daya saingnya. Sumber daya alam yang berpotensi tersebut bisa disebut dengan sektor basis yang merupakan sektor penghasil pendapatan dari luar daerah. Peningkatan daya saing sektor basis dalam perdagangan antar daerah akan membuat sektor lain di daerah tersebut juga meningkat daya saingnya. Peningkatan daya saing sektoral dapat dibantu dengan intervensi dari pemerintah berupa kebijakan.

Penelitian ini menggunakan tiga kebijakan yaitu kerja sama antar daerah dalam UU No 24 Tahun 2014, penguatan fiskal dan moneter dalam UU No 38 Tahun 2007 dan pelayanan publik dalam UU No 50 Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor yang termasuk dalam sektor basis, mengetahui tingkat daya saing dalam perdagangan antar daerah dan mengetahui kebijakan mana yang membantu dalam peningkatan daya saing sektoral di Kabupaten Jember.

Untuk mengetahui sektor yang termasuk dalam sektor basis pertama menggunakan analisis LQ dan menghitung nilai PDRB Kabupaten Jember terhadap Provinsi Jawa Timur sebagai daerah referensi. Setelah mengetahui sektor yang termasuk dalam sektor basis, yaitu: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan,

sektor pertambangan dan penggalan, sektor informasi dan komunikasi, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor pendidikan dan sektor kesehatan dan kegiatan sosial maka menganalisis data sub sektor dari sektor basis tersebut untuk menghitung sub sektor yang memiliki potensi di masa yang akan datang.

Perhitungan menggunakan analisis DLQ didapat hasil bahwa sub sektor tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, jasa pertanian dan perburuan serta sub sektor pertambangan dan penggalan memiliki potensi di masa yang akan datang. Setelah mengetahui sub sektor basis tersebut selanjutnya menganalisis komoditi sub sektor tanaman perkebunan untuk mengetahui tingkat daya saing di Kabupaten Jember. Hasil perhitungan menggunakan analisis RCA didapatkan hasil bahwa tembakau merupakan komoditi yang memiliki tingkat daya saing tinggi di Kabupaten Jember dengan nilai 5,45. Untuk membantu dalam peningkatan daya saing sektoral di Kabupaten Jember maka membuat kuesioner dan memberikan pada responden yang ahli di bidang ini, antara lain: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kuesioner yang telah diberikan kepada responden selanjutnya dihitung menggunakan analisis AHP. Ketiga alternatif pilihan yang ada kebijakan kerja sama antar daerah memiliki nilai bobot tertinggi sehingga kebijakan kerja sama antar daerah dapat membantu dalam peningkatan daya saing sektoral di Kabupaten Jember.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Sektor Potensial Dan Daya Saing Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E,M.P., selaku Dosen Pembimbing I, Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu , pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Drs. P. Edi Suswandi, M.P., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. keluarga yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
4. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 Februari 2019

Penulis

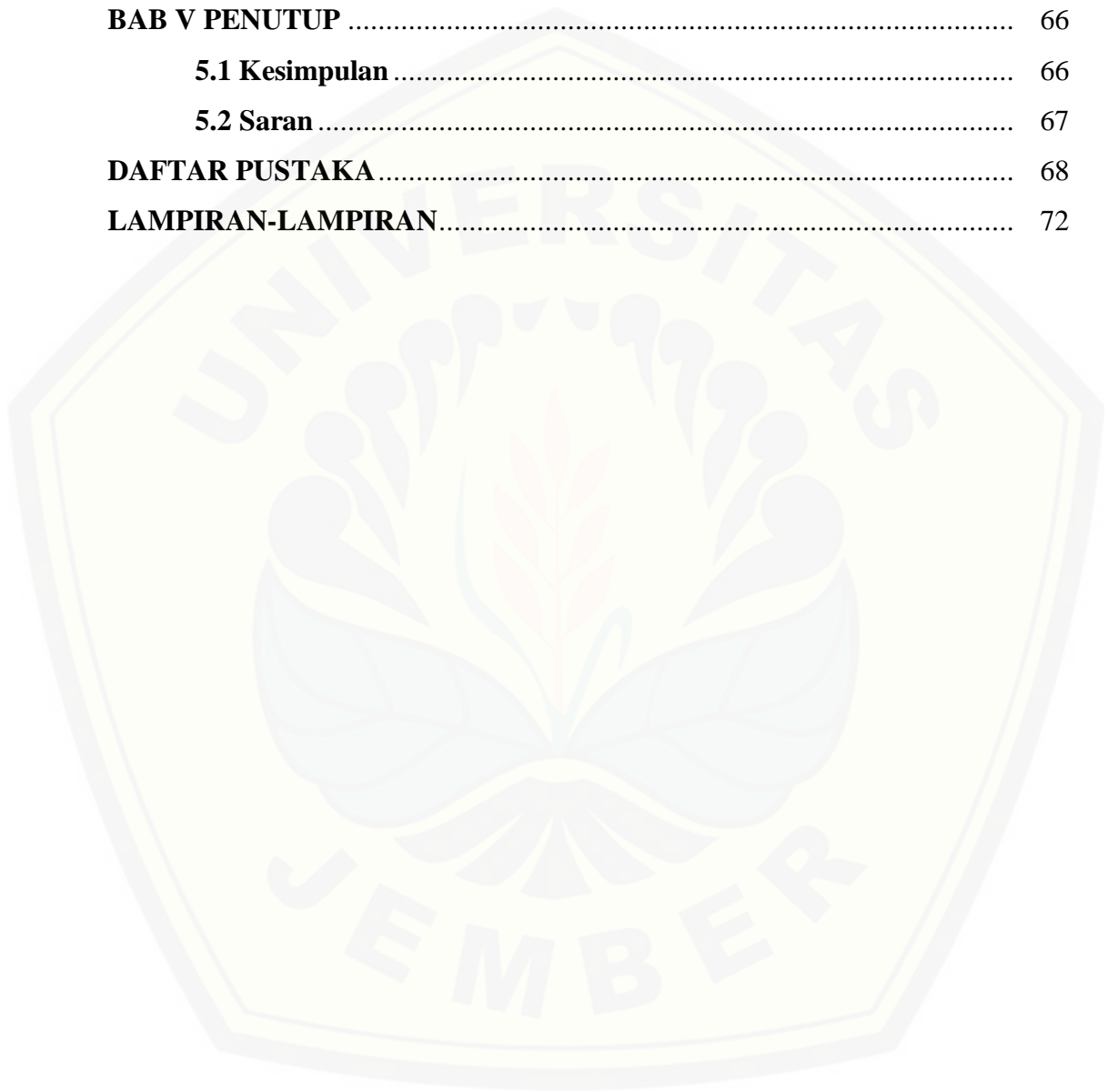


**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>PRAKATA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	13
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	13
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	15
2.1.1 Pembangunan Ekonomi Wilayah.....	15
2.1.2 Teori Basis Ekonomi.....	15
2.1.3 Teori Perdagangan.....	17
2.1.4 Teori Daya Saing.....	19
2.1.5 Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	20

2.1.6 Konsep Perdagangan Antar Daerah .....	21
<b>2.2 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>25</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
<b>3.1 Rancangan Penelitian .....</b>	<b>32</b>
3.1.1 Jenis Penelitian .....	32
3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
3.1.3 Unit Analisis .....	32
<b>3.2 Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>32</b>
3.2.1 Jenis Data.....	32
3.2.2 Sumber Data .....	33
<b>3.3 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>33</b>
<b>3.4 Metode Analisis Data.....</b>	<b>34</b>
3.4.1 <i>Location Quotient (LQ)</i> .....	34
3.4.2 <i>Dynamic Location Quotient (DLQ)</i> .....	34
3.4.3 <i>Revealed Comparative Advantage (RCA)</i> .....	35
3.4.4 <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i> .....	35
<b>3.5 Definisi Operasional .....</b>	<b>36</b>
3.5.1 Pembangunan Ekonomi Daerah.....	36
3.5.2 Daya Saing.....	37
3.5.3 Kebijakan.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian .....</b>	<b>39</b>
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Jember .....	39
4.1.2 Pemerintahan Kabupaten Jember .....	41
4.1.3 Kependudukan.....	41
4.1.4 Kondisi Perekonomian Kabupaten Jember .....	43
<b>4.2 Hasil Analisis.....</b>	<b>43</b>
4.2.1 Hasil Analisis <i>Dynamic Location Quotient (DLQ)</i> .....	43
4.2.2 Hasil Analisis <i>Revealed Comparative Advantage (RCA)</i> ....	46
4.2.3 Hasil Analisis <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i> .....	46

<b>4.3 Pembahasan</b> .....	47
4.3.1 Potensi Sektor dan Sub Sektor Jember.....	47
4.3.2 Daya Saing Komoditi Sub Sektor Basis Jember.....	52
4.3.3 Kebijakan Daya Saing Sektor Potensial Jember.....	58
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	66
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	66
<b>5.2 Saran</b> .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	72



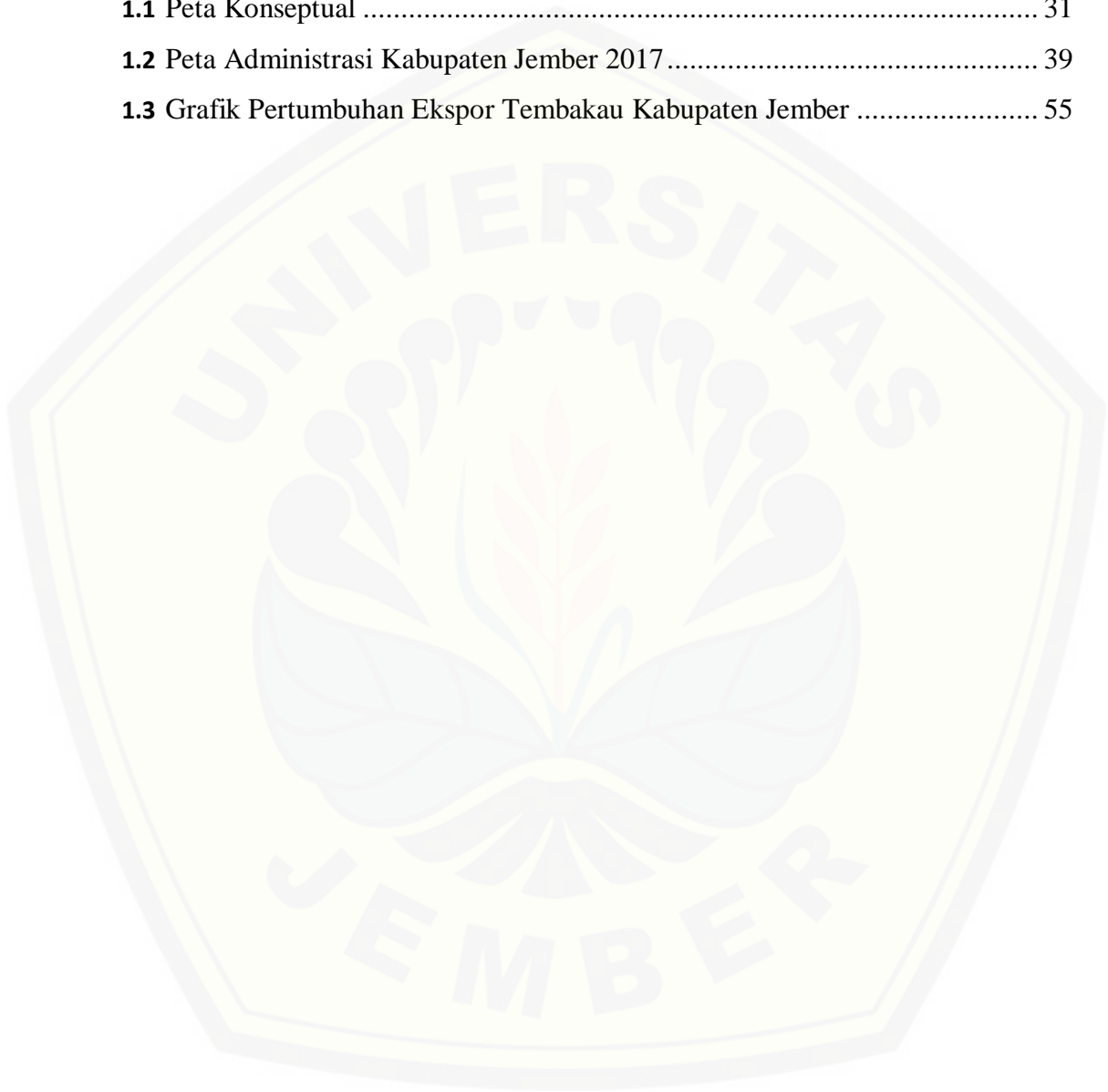


**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Luas Lahan Pertanian Menurut Kabupaten Jawa Timur .....	6
1.2 Ekspor Jenis Komoditi Kabupaten Jember.....	7
1.3 Luas Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Timur.....	9
1.4 Produksi Perkebunan Tembakau Jawa Timur .....	10
1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember .....	11
1.6 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember.....	12
2.1 Keunggulan Absolut.....	18
2.2 Keunggulan Komparatif.....	19
2.3 Matriks Penelitian Terdahulu .....	25
2.4 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu .....	28
4.1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Jember .....	40
4.2 Jumlah Kelurahan/Desa, Dusun/Lingkungan, RW, dan RT.....	41
4.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 2016 .....	42
4.4 Peranan PDRB Kabupaten Jember Tahun 2009-2017 .....	43
4.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember 2009-2017.....	44
4.6 Sektor Basis dan Non Basis Kabupaten Jember 2010-2017 .....	45
4.7 Tingkat Daya Saing Komoditi Kabupaten Jember .....	46
4.8 Hasil Analisis AHP .....	47
4.9 PDRB Subsektor Pertanian Kabupaten Jember .....	54

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
1.1 Peta Konseptual .....	31
1.2 Peta Administrasi Kabupaten Jember 2017 .....	39
1.3 Grafik Pertumbuhan Ekspor Tembakau Kabupaten Jember .....	55



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Lampiran
<b>1.1</b> PDRB Kabupaten Jember .....	72
<b>1.2</b> PDRB Provinsi Jawa Timur .....	73
<b>1.3</b> Ekspor Berdasarkan Jenis Komoditi Kabupaten Jember .....	74
<b>1.4</b> PDRB Sub Sektor Kabupaten Jember .....	75
<b>1.5</b> PDRB Sub Sektor Provinsi Jawa Timur .....	76
<b>1.6</b> Data Ekspor Jawa Timur dan Jember .....	77
<b>1.7</b> Kuesioner .....	78
<b>1.8</b> Pengujian Analisis AHP .....	95

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output dari waktu ke waktu yang menjadi indikator penting dalam pengukuran pembangunan di suatu negara berhasil atau tidak (Todaro, 2011). Pemerataan pertumbuhan ekonomi sangat penting sehingga akan berdampak pada pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur urusannya. Wewenang pemerintah daerah tersebut diimplementasikan pada pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2011).

Otonomi merupakan penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mencapai keefisienan dan keefektivitasan pelayanan masyarakat yang bersifat secara operasional. Konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah memaksimalkan upaya pelaksanaan daerah yang ada di daerah tersebut. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung untuk membangun kerja sama dengan publik dan pihak swasta di suatu daerah dalam berbagai bidang.

Otonomi daerah penting karena memberikan kebebasan bagi daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya yang diperkuat oleh hasil penelitian dari Nadir (2013) yang menjelaskan bahwa otonomi daerah akan memberikan kebebasan kepada daerah yang sesuai aspirasi rakyat. Uraian tersebut juga diperkuat oleh Amin (2013) yang menyatakan dengan adanya otonomi daerah akan membantu dalam pemanfaatan sumber daya nasional sehingga sumber daya tersebut akan optimal dalam membantu berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Otonomi daerah memiliki keterkaitan dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengurus segala urusan yang berkaitan dengan rumah tangga berdasarkan aspirasi masyarakat itu sendiri. Adanya desentralisasi memunculkan otonom bagi pemerintah daerah. Desentralisasi akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah tertinggal dalam suatu negara agar daerah dapat mandiri dan otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Desentralisasi dapat membantu dalam pengelolaan potensi ekonomi suatu daerah dijelaskan oleh hasil penelitian Jauchar (2012) yang menyatakan bahwa suatu daerah memerlukan upaya serius dari pemerintah yang berupa kebijakan dalam rangka memaksimalkan potensi sumber daya alam. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah sangat penting bagi suatu daerah karena apabila suatu daerah memiliki wewenang dalam mengatur urusan daerahnya terutama mengatur sumber daya alam yang dimiliki akan membantu dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh Nurkin (2005) menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi memberikan wewenang dalam aspek pendayagunaan sumberdaya alam yang tersedia di berbagai wilayah melalui pengelolaan yang bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Implikasi dari otonomi daerah diantaranya adalah melakukan perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah merupakan perdagangan yang dilakukan masyarakat suatu daerah dengan masyarakat di daerah lain. Perdagangan antar daerah bertujuan untuk saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan dengan menjual sektor unggulan dari daerah yang berkaitan.

Perdagangan antar daerah juga membantu meningkatkan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki daerah yang dijelaskan oleh Hajeri, Yurisinthae dan Dolorosa (2015) bahwa sektor unggulan penting untuk menentukan skala prioritas dalam pembangunan serta adanya pelaksanaan otonomi daerah dengan pemberdayaan potensi daerah tersebut akan bisa berjalan jika sektor unggulan daerah dapat dioptimalkan. Diana, Sulistiowati

dan Hadi (2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memegang peranan yang sangat strategis bagi perekonomian. Diartho (2018) menyatakan bahwa sektor ekonomi unggulan merupakan sektor yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah dan kegiatan ekonomi dalam meningkatkan investasi sektor unggulan tersebut.

Perdagangan antar daerah perlu didasari oleh teori perdagangan, yang menjelaskan adanya dua keunggulan, yakni keunggulan absolut oleh Adam Smith dan keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Perdagangan oleh Adam Smith didasarkan pada keunggulan absolut yang terjadi ketika satu negara atau daerah memiliki produk komoditi I yang lebih efisien dari negara atau daerah lain tetapi produk komoditi II kurang efisien. Kedua negara atau daerah tersebut akan mendapatkan keuntungan apabila saling memfokuskan pada produk komoditi yang lebih memiliki keunggulan absolut dan menukarkan hasil produk komoditi yang tidak memiliki keunggulan absolut. Perdagangan oleh David Ricardo akan terjadi antara kedua belah pihak apabila kedua belah pihak memiliki biaya yang relatif rendah atau kecil untuk masing-masing barang sehingga memiliki harga jual yang rendah dan dapat diperjualkan ke negara atau daerah lain.

Perdagangan penting untuk menggerakkan ekonomi daerah diperkuat oleh hasil penelitian Satryana dan Karmini (2016) bahwa perdagangan merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan penggerak bagi pertumbuhan. Adanya perdagangan yang mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah bahkan pembangunan nasional. Kornita, Yusuf dan Mayes (2009) menjelaskan bahwa perdagangan atau pemasaran merupakan ujung tombak dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bengkalis sehingga perdagangan suatu daerah dapat meningkatkan daya saing sektor unggulannya baik di pasar lokal maupun internasional sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.



Adanya perdagangan antar daerah dapat mendorong terjadinya kerja sama antar daerah yang dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 pengertian kerja sama antar daerah adalah kesempatan yang dibuat secara tertulis dan memiliki hak serta kewajiban antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota lain.

Kerja sama antar daerah penting dalam perdagangan karena dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang diperkuat dengan jurnal Handayani (2015) yang mengatakan bahwa dengan adanya kerjasama daerah dapat membantu dalam pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan. Pentingnya kerja sama antar daerah adalah untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Wahyudi dan Sari (2011) menngatakan dengan adanya kerja sama antar daerah akan membantu dalam menangani wilayah perbatasan dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dalam perdagangan dapat dibantu dengan intervensi kebijakan pemerintah. Kebijakan dapat menentukan daya saing sektor potensial yang ada di suatu daerah. Kebijakan pemerintah tersebut dapat berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Undang-Undang tersebut antara lain adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 363, PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Pasal 4, dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat 2.

Kebijakan pemerintah dapat membantu dalam meningkatkan daya saing sektor potensial yang diperkuat dengan jurnal Yolamalinda, Utami dan Amaluis (2016) yang menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan dapat membantu dalam meningkatkan daya saing produk lokal dan menambah pangsa pasar

produk lokal. Nurasa dan Setiajje (2008) mengatakan bahwa kebijakan dapat membantu dalam mengendalikan impor dengan membatasi importir hanya menjadi importir produsen dan importir. Adanya pembatasan tersebut maka masyarakat akan lebih banyak menggunakan produk lokal sehingga produk tersebut dapat bersaing di pasar lokal maupun luar.

Salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah adalah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki beberapa sektor yang berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Struktur ekonomi Kabupaten Jember didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Sumbangan terbesar dari ketiga sektor tersebut dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kabupaten Jember memiliki luas lahan pertanian terbesar kedua setelah Kabupaten Lamongan sebesar 86.1444 hektar (lihat Tabel 1.1). Luas lahan tersebut menjadi salah satu faktor sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang berkontribusi paling besar di Kabupaten Jember.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan didominasi oleh subsektor pertanian, perternakan, perburuan dan jasa pertanian yang diikuti oleh subsektor perikanan dan subsektor kehutanan dan penebangan kayu. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki beberapa subsektor yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, perternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan (BPS, 2014). Subsektor tersebut memiliki hasil komoditi yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Tanaman perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satu hasil komoditi subsektor tanaman perkebunan di Kabupaten Jember yang memiliki jumlah produksi dan ekspor terbesar di antara daerah lain adalah tembakau (lihat Tabel 1,2)

Daerah yang memiliki sektor potensial akan dapat menunjang perekonomian daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh sektor potensial tersebut akan memiliki dampak positif bagi pembangunan ekonomi. Sektor potensial tersebut perlu memiliki tingkat daya saing yang



tinggi untuk melakukan persaingan dalam perdagangan antar daerah untuk dapat tetap memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Tabel 1.1 Luas Lahan Pertanian dan Jenis Pengairan Menurut Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 (Hektar)

Kabupaten	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
01. Pacitan	8 565	4 218	12 783
02. Ponorogo	32 775	2 026	34 801
03. Trenggalek	11 626	1 255	12 881
04. Tulungagung	24 975	2 641	27 616
05. Blitar	28 657	3 023	31 680
06. Kediri	46 510	814	47 324
07. Malang	42 739	3 149	45 888
08. Lumajang	33 547	3 206	36 753
<b>09. Jember</b>	<b>84 964</b>	<b>1 180</b>	<b>86 144</b>
10. Banyuwangi	64 105	1 154	65 259
11. Bondowoso	35 451	258	35 709
12. Situbondo	31 836	2 226	34 062
13. Probolinggo	34 710	2 545	37 255
14. Pasuruan	37 647	2 158	39 805
15. Sidoarjo	21 852	219	22 071
16. Mojokerto	31 045	5 571	36 616
17. Jombang	42 014	6 693	48 707
18. Nganjuk	38 252	4 666	42 918
19. Madiun	31 163	1 883	33 046
20. Magetan	27 190	1 060	28 250
21. Ngawi	46 212	3 985	50 197
22. Bojonegoro	38 146	40 371	78 517
23. Tuban	29 337	27 054	56 391
<b>24. Lamongan</b>	<b>53 243</b>	<b>34 590</b>	<b>87 833</b>
25. Gresik	7 992	30 061	38 053
26. Bangkalan	8 049	21 491	29 540
27. Sampang	4 757	15 830	20 587
28. Pamekasan	7 325	10 581	17 906
29. Sumenep	8 819	16 747	25 566

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur, 2016

Tembakau di Kabupaten Jember jika dibandingkan dengan daerah lain memiliki tingkat daya saing lebih tinggi yang dapat ditinjau dari beberapa kriteria seperti luas lahan perkebunan tembakau dan produksi tembakau. Produksi tembakau Kabupaten Jember lebih tinggi dari pada daerah lain seperti Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Jember memproduksi tembakau sebesar 18.511 ton pada tahun 2015 sedangkan Kabupaten Banyuwangi hanya memproduksi sebesar 532 ton. Perbandingan produksi Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi tersebut menandakan bahwa tembakau Kabupaten Jember memiliki tingkat daya saing lebih tinggi. Daya saing tembakau Kabupaten Jember yang lebih tinggi tersebut memiliki arti bahwa tembakau Kabupaten Jember dapat bersaing dengan daerah lain sehingga memiliki potensi untuk dijual atau diekspor ke luar daerah sehingga menghasilkan pendapatan dari luar daerah.

Tabel 1.2 Ekspor Menuut Jenis Komoditi Kabupaten Jember

No	Jenis Komoditi	2013	2014	2015
1	Karet	15.618.000,00	11.652.303,34	-
2	Kopi	389.400,00	787.293,13	-
3	Coklat	513.700,00	1.039.198,74	-
4	Tembakau	<b>179.324.353,60</b>	<b>153.301.343,3</b>	<b>129.850.275,0</b>
	a. Na Oogst	-	-	-
	b. Voor Oogst	-	-	-
	c. Bobin	-	-	-
	d. Na Oogst+Vo or Oogst	-	-	-
	e. Na Oogst TBN	-	-	-
5	Panili	150.000,00	-	-
6	Edamame	7.981.968,00	5.923.025,00	<b>8.843.676,00</b>
7	Mukiname	-	-	-
8	Batu Piring	5.323.031.590,00	482.878,84	-
9	Terong Beku	-	-	<b>386.320,00</b>
10	Meubel	-	-	-
11	Okra	2.309.193,00	2.203.354,00	<b>2.309.193,00</b>
12	Patung Batu	-	-	-
13	Scalpture	-	-	-
14	Cocofiber	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.529.318.204,60</b>	<b>175.389.396,35</b>	<b>141.617.221,00</b>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, 2016

Produksi tembakau Kabupaten Jember pada Tabel 1.2 dari tahun 2010 hingga 2015 memiliki rata-rata sebesar 12.722 ton. Kabupaten Pamekasan memiliki rata-rata produksi sebesar 13.546 ton yang lebih tinggi dari Kabupaten Jember. Tabel 1.4 menunjukkan peranan PDRB Kabupaten Jember didominasi oleh sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang menunjukkan bahwa meskipun produksi tembakau di Kabupaten Jember merupakan daerah produksi kedua tertinggi tetapi sektor pertanian masih memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Jember.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki peranan terbesar bagi pertumbuhan di Kabupaten Jember dikarenakan bukan hanya tembakau saja yang menunjang sektor tersebut tetapi juga masih banyak hasil komoditi dari subsektor pertanian di Kabupaten Jember yang berkontribusi. Subsektor pertanian lain juga menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Subsektor pertanian tersebut ditunjang dengan luas lahan pertanian yang besar serta terdapat pengairan yang memadai bagi lahan tersebut.

Subsektor perkebunan memiliki beberapa komoditi ekspor yang juga menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Karet merupakan salah satu jenis komoditi yang juga menjadi komoditi ekspor yang membantu menambah pendapatan bagi kas daerah. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa karet merupakan salah satu komoditi tanaman perkebunan Kabupaten Jember yang memiliki lahan perkebunan karet paling besar dari pada daerah lain yaitu sebesar 10.688 hektar. Luas perkebunan karet ini membantu Kabupaten Jember menghasilkan komoditi karet untuk diperjualkan dalam perdagangan antar daerah.

Perdagangan antar daerah yang melakukan proses penjualan atau ekspor komoditi tersebut akan membentuk hubungan kemitraan antara pihak swasta dan publik sehingga membantu dalam peningkatan daya saing dari komoditi yang ada di daerah. Peningkatan daya saing baik bagi komoditi tembakau, karet dan komoditi lainnya akan membantu dalam peningkatan pertumbuhan

ekonomi yang akan berdampak pada pembangunan ekonomi Kabupaten Jember itu sendiri.

Tabel 1.3 Luas Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Timur 2016

Kabupaten	Karet	Kelapa	Cengkeh	Kopi	Tebu	Kakao	Lainnya
Pacitan	-	24 725	8 163	2 192	-	6 007	3 129
Ponorogo	-	4 907	2 802	1 048	1 017	2 322	5 393
Trenggalek	-	15 211	5 708	566	336	4 355	742
Tulungagung	353	19 733	1 845	761	6 071	1 829	2 602
Blitar	1 042	19 015	3 153	5 847	6 790	5 090	3 980
Kediri	349	9 276	2 013	3 708	27 249	4 270	22 762
Malang	203	13 917	5 456	17 547	44 318	3 631	8 352
Lumajang	477	8 132	2 073	4 714	20 184	2 778	11 088
<b>Jember</b>	<b>10 688</b>	<b>13 795</b>	<b>1 117</b>	<b>18 230</b>	<b>9 517</b>	<b>4 029</b>	<b>22 807</b>
Banyuwangi	5 602	28 112	2 789	17 979	6 039	9 538	13 589
Bondowoso	-	4 246	110	12 798	4 341	95	5 168
Situbondo	-	4 361	10	3 028	8 222	-	6 773
Probolinggo	-	4 110	894	4 857	3 815	8	15 194
Pasuruan	-	5 927	1 315	-	4 546	-	20 459
Sidoarjo	-	1 746	-	-	4 148	-	468
Mojokerto	-	621	160	166	9 233	-	1 833
Jombang	29	1 270	2 186	1 333	9 259	1 690	4 708
Nganjuk	-	3 332	2 279	218	3 201	2 619	6 317
Madiun	279	3 962	1 761	1 477	2 892	5 761	6 848
Magetan	-	2 823	941	667	7 543	995	9 867
Ngawi	1 302	6 162	814	1 152	6 116	2 033	15 540
Bojonegoro	-	7 883	-	-	1 694	-	7 255
Tuban	-	5 292	-	-	1 641	-	5 912
Lamongan	-	1 860	-	-	5 600	-	14 211
Gresik	-	4 635	46	-	2 374	-	188
Bangka lan	-	7 868	20	-	617	-	13 567
Sampang	-	3 290	-	-	1 582	-	14 308
Pamekasan	-	3 756	-	6 769	-	-	13 508
Sumenep	-	51 171	245	18	195	52	39 718

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 2016

Luas lahan pertanian termasuk lahan subsektor pertanian seperti tanaman perkebunan di Kabupaten Jember menguntungkan Kabupaten Jember untuk melakukan pengolahan sumber daya alam yang ada.

Tabel 1.4 Produksi Perkebunan Tembakau Jawa Timur

Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
01 Pacitan	-	-	65	52	84	78	68
02 Ponorogo	518	660	345	68	551	512	356
03 Trenggalek	-	-	-	103	125	116	332
04 Tulungagung	703	1 145	2 243	929	2 159	2 004	1.233
05 Blitar	485	532	2 045	129	951	883	591
06 Kediri	-	-	-	151	151	140	66
07 Malang	-	-	-	1 254	1 113	1 033	1.303
08 Lumajang	812	1 084	1 053	2 992	1 339	1 243	2.810
09 Jember	<b>7 235</b>	<b>15 846</b>	<b>31 284</b>	<b>18 297</b>	<b>19 939</b>	<b>18 511</b>	<b>12.722</b>
10 Banyuwangi	1 130	1 219	1 948	546	573	532	1.562
11 Bondowoso	3 736	7 440	4 123	5 607	4 967	4 611	4.243
12 Situbondo	4 920	7 488	8 856	2 287	5 015	4 656	5.697
13 Probolinggo	9 805	7 835	10 336	9 528	13 098	12 160	9.764
14 Pasuruan	-	-	-	16	507	471	166
15 Sidoarjo	-	-	-	15	15	14	38
16 Mojokerto	195	485	672	580	390	362	909
17 Jombang	604	2 401	4 519	4 740	7 110	6 601	3.321
18 Nganjuk	433	824	1 200	965	1 176	1 092	727
19 Madiun	161	156	493	832	430	399	348
20 Magetan	649	445	619	-	309	287	590
21 Ngawi	639	727	2 828	-	2 331	2 164	2.958
22 Bojonegoro	3 857	15 218	11 216	5 292	9 210	8 550	7.269
23 Tuban	525	1 579	2 095	58	1 789	1 661	2.157
24 Lamongan	2 053	7 331	13 704	4 856	7 053	6 548	4.593
25 Gresik	-	-	-	42	44	41	21
26 Bangkalan	-	-	-	-	-	-	1.478
27 Sampang	1 429	3 002	2 702	441	2 896	2 689	4.917
28 Pamekasan	<b>10 242</b>	<b>16 688</b>	<b>19 236</b>	<b>3 642</b>	<b>15 018</b>	<b>13 940</b>	<b>13.546</b>
29 Sumenep	3 139	9 247	13 392	3 230	9 430	8 755	8.372

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 2015



Pemilihan tahun dasar 2010 dalam penelitian ini dikarenakan pada tahun tersebut tren pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember tinggi. Dari tahun 2010-2014 Kabupaten Jember mengalami tren kenaikan pertumbuhan ekonomi yang masing-masing besarnya dari tahun 2011 adalah 5,49%; 5,83%; 6,06%; dan 6,21%. Dari Tabel 1.3 dapat menunjukkan bahwa setiap tahunnya Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2015 sendiri pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember mengalami penurunan secara signifikan yaitu sebesar 0,85%. Penurunan tersebut dikarenakan keadaan ekonomi global yang tidak stabil seperti kenaikan harga BBM, harga dasar listrik dan cuaca yang terus berubah. Cuaca yang terus berubah mengakibatkan hasil dari sektor pertanian tidak stabil. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Jember adalah sektor pertanian sehingga dengan cuaca yang tidak mendukung maka menghambat dan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi (BPS,2017).

Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember

Tahun	Laju Pertumbuhan %
<b>2009</b>	5,55
<b>2010</b>	5,70
<b>2011</b>	5,49
<b>2012</b>	5,83
<b>2013</b>	6,06
<b>2014</b>	6,21
<b>2015</b>	5,36
<b>2016</b>	5,21
<b>2017</b>	5,11

Sumber BPS Kabupaten Jember Tahun 2017

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa sektor ekonomi terutama sektor potensial di Kabupaten Jember memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi sehingga perlu untuk mengetahui sektor ekonomi mana yang termasuk ke dalam sektor potensial. Setelah mengetahui sektor mana yang termasuk ke dalam sektor potensial pemerintah daerah perlu untuk mengelolah dan mengembangkan sektor potensial tersebut agar dapat memiliki daya saing yang kuat dalam perdagangan. Semakin unggul sektor potensial tersebut di dalam perdagangan akan membantu dalam peningkatan sektor-sektor lain sehingga

akan semakin banyak sektor yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk membantu dalam perdagangan perlu adanya intervensi pemerintah yang berupa kebijakan. Dengan adanya kebijakan akan lebih mudah dalam peningkatan terhadap sektor potensial.

Tabel 1.6 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2017

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b> Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	31,99	31,78	31,06	30,74	30,66	30,21	29,05
2 Pertambangan dan Penggalian	5,54	5,19	4,94	4,66	4,49	4,45	4,43
3 Industri Pengolahan	20,42	20,81	19,94	19,84	19,86	19,55	19,88
4 Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
6 Kontruksi	6,46	6,30	6,85	7,33	7,36	7,55	7,82
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,66	11,54	12,14	12,38	12,59	12,93	13,35
8 Transportasi dan Pergudangan	1,40	1,39	1,50	1,57	1,61	1,65	1,72
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,95	2,05	2,09	2,09	2,14	2,25	2,33
10 Informasi dan Komunikasi	6,16	5,90	6,01	5,83	5,96	6,05	6,15
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	2,08	2,24	2,35	2,33	2,34	2,38	2,37
12 Real Estat	1,34	1,34	1,39	1,40	1,40	1,39	1,38
13 Jasa Perusahaan	0,31	0,31	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,65	3,66	3,66	3,61	3,51	3,52	3,46
15 Jasa Pendidikan	5,04	5,51	5,76	5,92	5,76	5,79	5,75
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,70	0,72	0,72	0,72	0,74	0,74	0,76
17 Jasa Lainnya	1,20	1,14	1,14	1,13	1,12	1,10	1,08

Sumber BPS Kabupaten Jember Tahun 2017

Kabupaten Jember merupakan daerah yang memiliki banyak potensi terutama potensi pertaniannya. Sektor yang menjadi sektor potensial di Kabupaten Jember untuk dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya peningkatan daya saing agar dapat menguasai pangsa pasar. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk dapat memaksimalkan daya saing sektor potensial tersebut. Penelitian yang berjudul “Analisis sektor potensial dan daya saing subsektor tanaman perkebunan di kabupaten jember” ini akan menguraikan beberapa rumusan masalah untuk menunjang daya saing sektor potensial dalam perdagangan antar daerah di Kabupaten Jember. Rumusan masalah tersebut diuraikan dalam subbab selanjutnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas menghasilkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Sektor apakah yang termasuk dalam sektor basis dan non basis di Kabupaten Jember?
2. Sektor apakah yang menjadi sektor potensial di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana daya saing sektor potensial dalam perdagangan antar daerah di Kabupaten Jember?
4. Bagaimana kebijakan yang dapat mendukung daya saing sektor potensial dalam perdagangan antar daerah di Kabupaten Jember?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sektor yang termasuk dalam sektor basis dan non basis di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui yang termasuk dalam sektor potensial di Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui daya saing sektor potensial dalam perdagangan antar daerah di Kabupaten Jember.
4. Untuk mengetahui kebijakan yang mendukung daya saing sektor potensial dalam perdagangan antar daerah di Kabupaten Jember.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari uraian tujuan penelitian di atas didapatkan beberapa manfaat penelitian. Manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sebagai informasi terkait kepada peneliti untuk menentukan sektor mana yang termasuk sektor potensial dan bagaimana daya saingnya dalam perdagangan antar daerah.
2. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan sektor-sektor potensial dan daya saing sektor tersebut.



3. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah Kabupaten Jember dalam menentukan kebijakan untuk mendukung daya saing sektor potensial dalam perdagangan antar daerah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pembangunan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk membentuk hubungan pemerintah daerah dan swasta sehingga lapangan baru akan tercipta serta terjadinya pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Model pembangunan yang digunakan oleh negara berkembang terbagi menjadi beberapa model yaitu:

1. Model I yang menitikberatkan pada pelaksanaan penanaman modal atau investasi dalam jumlah besar pada sektor industri dengan menunjang pemusatan pada bagian wilayah tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Model II menitikberatkan pada strategi pemerataan pembangunan negara berkembang dengan cara pemenuhan kebutuhan pokok seperti pengembangan kesempatan kerja, pemberantasan kemiskinan, perbaikan gizi, air bersih dan perumahan.
3. Model III menitikberatkan pada pengembangan partisipasi masyarakat dengan cara pembangunan kualitas sumber daya manusia.
4. Model IV menitikberatkan pada perdagangan dan persaingan bebas yang dilakukan antar dua belah pihak yang memerlukan adanya penguatan daya saing ekonomi masing-masing wilayah.

##### 2.1.2 Teori Basis Ekonomi

Pandangan teori basis ekonomi adalah besarnya peningkatan ekspor suatu daerah menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Ekspor dalam ekonomi regional adalah proses memperjualkan produk atau

jasa daerah tersebut ke luar daerah. Ekonomi regional membagi sektor kegiatan ekonomi antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Basis

Kegiatan basis adalah semua kegiatan yang menghasilkan dan menyediakan produk atau jasa untuk diperjualkan di luar wilayah sehingga menghasilkan pendapatan untuk daerah tersebut.

b. Kegiatan Nonbasis

Kegiatan nonbasis adalah semua kegiatan yang menghasilkan dan menyediakan produk atau jasa untuk masyarakat di dalam ruang lingkup daerah tersebut.

Kegiatan basis dan non basis dapat dibedakan dengan menggunakan beberapa metode, antara lain:

a. Metode Langsung

Metode langsung dapat dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha untuk mengetahui bagaimana mereka memasarkan produknya dan di mana mereka membeli bahan baku dalam produk yang dijualnya. Hasil survei tersebut dapat menentukan berapa persen produk yang dijual ke luar daerah dan dalam daerah tersebut.

b. Metode Tidak Langsung

Salah satu metode tidak langsung adalah dengan menggunakan asumsi berdasarkan kondisi wilayah yang mengasumsikan mana yang termasuk dalam kegiatan basis dan nonbasis.

c. Metode Campuran

Metode ini menggunakan survei untuk mengumpulkan data sekunder lalu menganalisis dan menentukan yang termasuk dalam kegiatan basis dan nonbasis. Apabila 70% atau lebih produk diperjualkan ke luar wilayah diasumsikan termasuk kegiatan basis dan sebaliknya.

### 2.1.3 Teori Perdagangan

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori perdagangan, yaitu:

#### a. Teori Keunggulan Absolut (Adam Smith)

Pemikiran teori ini adalah bahwa negara akan melakukan spesialisasi dan mengekspor produk yang memiliki keunggulan absolut atas negara atau daerah lain yang memproduksi barang yang sama, dan mengimpor produk yang tidak memiliki keunggulan absolut atas negara atau daerah lain yang memproduksi barang yang sama. Teori ini menekankan keefisienan dalam penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja yang menentukan tingkat daya saing maupun keunggulan negara atau daerah tersebut (Tambunan, 2004).

Menurut Adam Smith perdagangan akan terjadi apabila dua negara atau daerah memiliki keefisienan dalam produk komoditi I tetapi kurang efisien dalam produk komoditi II. Kedua negara atau daerah tersebut akan mendapatkan manfaat apabila lebih memfokuskan pada produk komoditi yang memiliki keunggulan absolut dan menukarkan produk komoditi yang tidak memiliki keunggulan absolut. Proses ini membantu dalam peningkatan komoditas karena merupakan cara yang paling efisien dalam pengalokasian sumber daya alam. Peningkatan hasil komoditas ini merupakan manfaat yang didapat dari spesialisasi produk melalui perdagangan yang telah dilakukan.

Penganut merkantilisme percaya apabila satu negara atau daerah akan mendapat keuntungan bila mengorbankan negara atau daerah lain dan menekankan pentingnya campur tangan dari pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Adam Smith menyangkal kepercayaan merkantilisme dan menekankan apabila kedua negara atau daerah akan mendapat keuntungan apabila mengurangi adanya campur tangan pemerintah dalam segala kegiatan ekonomi yang ada (Salvatore, 2014).

Ilustrasi teori ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 yang menggunakan asumsi satu jam kerja dari waktu ke waktu dapat menghasilkan 10 meter

kain sutra pada daerah A sedangkan pada daerah B hanya dapat menghasilkan 2 meter kain sutra. Pada sisi lain di daerah A dengan satu jam kerja dapat menghasilkan 2 tas dan di daerah B hanya 4 tas. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa daerah A lebih memiliki keunggulan absolut sehingga dapat dikatakan lebih efisien dari daerah B dalam produksi kain sutra sedangkan daerah B lebih memiliki keunggulan absolut sehingga dapat dikatakan lebih efisien dari daerah A dalam produksi tas. Ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa daerah A lebih mengkhususkan produksi kain sutra dan sebagian diperjualkan untuk mendapatkan tas dari daerah B dan sebaliknya.

Tabel 2.1 Ilustrasi Keunggulan Absolut

	Negara A	Negara B
Kain Sutra	10	2
Tas	2	4

b. Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo)

Teori David Ricardo membuktikan bila dua negara atau daerah yang melakukan perdagangan akan mendapatkan keuntungan apabila lebih memfokuskan dalam mengeksport produk yang memiliki keunggulan komparatif. Komoditi dikatakan memiliki keunggulan komparatif apabila lebih unggul dari pada komoditi lain di dalam daerahnya. Pengertian unggul dalam keunggulan komparatif berbentuk perbandingan bukan nilai tambah riil sehingga produk yang memiliki keunggulan komparatif lebih menguntungkan untuk dikembangkan.

Perdagangan bebas antar daerah mekanisme pasar mendorong daerah yang tidak memiliki keunggulan komparatif bergerak ke arah daerah yang memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah kegiatan ekonomi yang berbentuk perbandingan lebih menguntungkan untuk dikembangkan lagi dalam daerah tersebut. David Ricardo menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai perbandingan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk sama untuk kegiatan berbeda dalam dua negara atau daerah. Menurut David, perdagangan terjadi apabila



dua negara atau daerah memiliki biaya relatif rendah pada produk berbeda yang dihasilkan (produktivitas TK relatif besar). David menekankan perbedaan efisiensi atau produktivitas antara dua negara atau daerah dalam memproduksi dua atau lebih barang atau jasa. Ilustrasi dari teori keunggulan komparatif dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Ilustrasi Keunggulan Komparatif

	AS	Inggris
Harga satu gantang gandum	\$1,00	\$2,00
Harga satu meter kain	1,50	1,00

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa harga dolar gandum yang memiliki keunggulan komparatif adalah Inggris. Harga satu meter kain yang memiliki keunggulan komparatif adalah AS. Pedagang AS akan menjual gandum di Inggris dan akan membeli kain di Inggris untuk dijual di negaranya.

#### 2.1.4 Teori Daya Saing

Daya saing adalah keunggulan yang ditunjukkan oleh suatu industri dengan menunjukkan kondisi di mana kemampuan dan hasil kerja industri tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan industri lain. Keunggulan daya saing ditentukan berdasarkan efisiensi dan efektifitas faktor produksi. Menurut Heckscher-Ohlin (1990) faktor produksi yang digunakan seperti tanah, modal, dan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat umum. Ada beberapa faktor produksi lain yang dapat mengukur daya saing seperti sumber daya, fisik, infrastruktur, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Keunggulan daya saing juga ditentukan berdasarkan biaya produksi yang rendah tetapi memiliki kualitas tinggi. Teori ini menekankan pada faktor *endowment* yang dapat menjelaskan bahwa sumber daya melimpah yang berbeda pada suatu negara mempunyai keunggulan pada komoditas yang berbeda.

Menurut Porter, dalam membangun suatu negara dapat melihat kondisi dari beberapa faktor yaitu: tenaga kerja terampil dan sarana dan

prasarana, kondisi permintaan dan tuntutan mutu dalam negeri, eksistensi industri terkait dan pendukung yang memiliki daya saing, strategi, struktur dan persaingan antar perusahaan (Wardhani dan Agustina, 2014). Intensitas persaingan berakar pada struktur ekonomi diluar perilaku pesaing industri lain.

#### 2.1.5 Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah berdasarkan aspirasi masyarakat untuk mengurus urusan rumah tangga di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi memunculkan otonom pemerintah daerah yang memiliki dampak positif bagi daerah tertinggal untuk dapat berdiri mandiri serta membantu dalam memajukan pembangunan nasional.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah sesuai perundang-undangan tanpa adanya campur tangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Otonomi adalah penyerahan urusan dari pusat ke daerah yang bertujuan untuk mencapai suatu keefesienan dan kevektivitasan pelayanan masyarakat yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Adanya otonomi akan membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan dan membangun kerja sama dengan publik dan swasta di berbagai bidang.

Konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah mengupayakan pemaksimalan pelaksanaan daerah dan menghindari kerumitan yang ada sehingga tuntutan dari masyarakat dapat terjawab dengan adanya pengiplikasian otonomi daerah dan pelayanan masyarakat terlaksana. Otonomi daerah dapat didukung dengan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab yang jauh dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta keungan pemerintah pusat dan daerah yang seimbang.

### 2.1.6 Konsep Perdagangan Antar Daerah

Perdagangan antar daerah terjadi dikarenakan ada perbedaan penawaran dan permintaan dalam komoditas. Penawaran dipengaruhi oleh harga komoditas, teknologi produksi, biaya produksi, iklim dan jumlah produsen. Permintaan dipengaruhi harga komoditas tersebut, harga barang substitusi dan barang pelengkap, pendapatan konsumen, selera konsumen, jumlah penduduk dan perkiraan harga di masa yang akan datang.

Perdagangan antar daerah dapat berjalan lancar apabila terdapat intervensi dari pemerintah berupa kebijakan. Penelitian ini menggunakan beberapa kebijakan untuk membantu dan mendorong dalam peningkatan daya saing sektoral di Kabupaten Jember, antara lain:

#### a. Kerja Sama Antar Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 363 yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh daerah dengan: a. daerah lain; b. pihak ketiga; c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Kerja sama antar daerah dalam penelitian ini menggunakan beberapa strategi antara lain:

#### (1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam

Peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan sumber daya alam akan membantu dalam peningkatan daya saing sektoral. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam akan meningkatkan produktivitas sumber daya alam yang diolah tersebut. Peningkatan



produktivitas dari sumber daya alam tersebut akan meningkatkan kualitas dan daya saing dari sumber daya alam tersebut.

(2) Sosialisasi potensi daerah

Sosialisasi potensi daerah akan membantu dalam peningkatan daya saing sektoral dikarenakan dengan pengenalan potensi suatu daerah kepada daerah lain akan merangsang daerah lain untuk melakukan pembelian atau memberikan investasi kepada daerah yang memiliki potensi tersebut. Semakin banyak minat daerah lain kepada potensi daerah tersebut akan merangsang daerah dalam meningkatkan kualitas agar dapat menguasai pangsa pasar. Daerah dengan potensi tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki daya saing tinggi.

(3) Pemasaran produk

Pemasaran produk akan membantu dalam peningkatan daya saing sektoral dikarenakan dengan adanya pemasaran produk daerah lain akan mengetahui produk yang diperjualkan oleh daerah tersebut sehingga dapat dialokasikan semaksimal mungkin pada perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah akan membantu daerah tersebut untuk menjual produknya ke daerah lain bahkan luar negeri.

b. Pelayanan Publik

PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Pasal 4 yang berbunyi:

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Pelayanan publik dalam penelitian ini menggunakan beberapa strategi antara lain:

(1) Permudah perizinan

Perizinan akan membantu dalam peningkatan daya saing sektoral karena dengan permudahan terhadap perizinan maka baik aparat pemerintah dan masyarakat akan lebih dipermudah dalam pengelolaan

sumber daya alam dan produk yang akan diunggulkan oleh daerah tersebut. Perizinan juga akan menghilangkan hambatan industri-industri dalam kegiatan ekonomi sehingga selain akan meningkatkan daya saing sektoral juga akan merangsang terbentuknya hasil komoditas lain yang sebelumnya belum memiliki keunggulan.

(2) Perluasan lapangan kerja

Perluasan lapangan kerja akan membantu dalam peningkatan daya saing sektoral dikarenakan tenaga kerja yang belum bekerja akan mendapatkan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran akan berkurang. Pengangguran yang berkurang tersebut akan membantu dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pemasukan kas daerah meningkat dan dapat dialokasikan untuk pengelolaan sumber daya alam berpotensi tersebut. Perluasan lapangan kerja juga akan merangsang terjadinya spesialisasi produk sehingga potensi alam yang ada di suatu daerah tidak terbengkalai.

(3) Pelatihan keterampilan

Pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah akan membantu dalam peningkatan daya saing sektoral dikarenakan dengan adanya pelatihan tersebut tenaga kerja (masyarakat) yang belum memiliki keterampilan untuk melakukan suatu pekerjaan akan dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya alam. Keterampilan tersebut akan membantu tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dari sumber daya alam tersebut sehingga dapat bersaing dan bahkan menguasai pangsa pasar.

c. Penguatan Fiskal dan Moneter

PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi:

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Penguatan fiskal dan moneter dalam penelitian ini menggunakan beberapa strategi antara lain:

(1) Peningkatan investasi

Peningkatan investasi akan membantu dalam peningkatan daya saing sektoral dikarenakan adanya investasi berarti banyak pihak-pihak yang tertarik terhadap potensi daerah tersebut sehingga modal dari investasi tersebut dapat dialokasikan untuk peningkatan produktivitas potensi daerah tersebut sehingga daya saing dari potensi tersebut akan meningkat sehingga dapat melakukan persaingan dalam perdagangan antar daerah.

(2) Peningkatan ekspor

Peningkatan ekspor akan membantu dalam peningkatan daya saing sektoral dikarenakan dengan adanya ekspor akan membantu daerah tersebut mengenalkan potensi daerahnya kepada daerah lain dan menunjukkan bahwa potensi daerahnya memiliki kualitas yang tinggi untuk dapat bersaing dengan potensi daerah lain. Ekspor juga akan membantu dalam peningkatan pemasukan kas daerah sehingga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

(3) Pemberian subsidi

Pemberian subsidi akan membantu dalam peningkatan daya saing. Pemberian subsidi dalam hal ini tidak hanya berbentuk dalam bentuk uang atau modal tapi juga dapat berbentuk bahan baku yang diperlukan suatu daerah untuk dapat memaksimalkan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerahnya. Pemaksimalan pengelolaan dengan adanya subsidi tersebut akan membantu dalam peningkatan produktivitas sehingga daya saing sumber daya alam tersebut akan meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Penulis	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Analisis Sektor Ekonomi Basis dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu (Setiawan, 2014)	- Kontribusi Sektoral - LQ - <i>Shift Share</i> - MRP - Tipologi Klassen	- Berdasarkan analisis LQ empat sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif di Kota Batu adalah sektor pertanian, sektor listrik dan gas dan air bersih, sektor perdagangan hotel dan restoran serta keuangan persewaan dan jasa perusahaan. - Sektor penopang pertumbuhan ekonomi berdasarkan kriteria pertumbuhan (kompetitif) dan kontribusi pertumbuhan (komperatif) di Kota Batu adalah sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor listrik gas dan air bersih.
2	Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dalam Pengembangan Potensi Perekonomian di Kota Blitar (Tristanto, 2013)	- LQ - <i>Shift Share</i>	- Berdasarkan hasil analisis LQ menunjukkan yang termasuk sektor basis adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan/kontruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa - Berdasarkan analisis <i>shift share</i> menunjukkan bahwa yang termasuk ke dalam sektor ekonomi unggulan di Kota Blitar adalah sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor bangunan/ kontruksi yang termasuk ke dalam sektor basis dan kompetitif
3	Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kepulauan Sangihe (Takamulang, Rumate, dan Lapina, 2018)	- LQ - <i>Shift Share</i>	- Terdapat 6 sektor basis atau unggulan, yaitusektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor pertanian, kehutanan dan perikatan, sektor real estate, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial
4	Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Muara Enim (Yulianita, 2010)	- LQ - <i>Shift Share</i>	- Berdasarkan analisis LQ Kabupaten Muara Enim memiliki sektor unggulan, yaitu sektor pertanian terutama pada subsektor tanaman bahan makana, sektor pertambangan dan hasilnya dengan sub sektor minyak dan gas bumi, pertambanga tanpa migas, penggalian, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi terutama sub sektor angkutan rel
5	Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di	- LQ - MRP	- Berdasarkan analisis LQ sektor yang menjadi unggulan di Maluku Utara adalah sektor pertanian dan sektor kontruksi



	Provinsi Maluku Utara (Diana, Sulistiowati, dan Hadi, 2007)	<i>Shift Share</i>	- Berdasarkan analisis MRP pada sektor ekonomi potensial adalah sektor perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor kontruksi dan sektor pengadaan listrik dan gas - Berdasarkan analisis <i>Shift Share</i> pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Hlamahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan
6	Analisis Daya Saing Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Sukanto, 2009)	- Deskriptif kualitatif (rata-rata, pertumbuhan, rasio) - Tipologi klassen	Hasil penelitian menunjukkan suatu pola daya saing antar daerah yang peringkat atas didominasi oleh Kabupaten/Kota lama (Palembang) sementara peringkat terbawah ditempati daerah baru hasil pemekaran
7	Analisis Daya Saing Komoditas Kelapa di Kabupaten Kupang (Setiawan, Hartono dan Suryantin, 2014)	<i>Policy Analysis Matrix (PAM)</i>	- Usaha tani kelapa di Kabupaten Kupang tidak memiliki keunggulan kompetitif dilihat dari nilai PP yang negatif dan PCR yang lebih besar dari satu. Namun memiliki keunggulan komparatif dilihat dari nilai SP yang positif dan DRC yang lebih kecil dari satu - Komoditas kelapa di Kabupaten Kupang berdaya saing sedang dan masih dapat dikembangkan, salah satunya dengan cara meningkatkan nilai tambah dari pengolahan kelapa
8	Analisis Daya Saing Kedelai Indonesia (Sarwono, 2014)	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	- Produksi dan ekspor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap daya saing kedelai Indonesia - Nilai tukar dan kebijakan pemerintha tidak berpengaruh terhadap daya saing kedelai Indonesia
9	Analisis Daya Saing Komoditi Ekspor Unggulan Indonesia di Pasar Internasional (Ustiaji, 2016)	<i>Revealed Comparative Advantage</i>	- Pada komoditi unggulan Indonesia dari beberapa komoditi tersebut mengalami kenaikan pertumbuhan yang cukup signifikan - Penyumbang terbesar dari komoditi unggulan tersebut pada komoditi kelapa sawit yang mencapai peringkat pertama dengan nilai total ekspor tahun 2010-2014 - Industri sawit, hasil hutan, alas kaki, kakao, kopi, karet dan tekstil pada tahun 2010-2014 memiliki daya saing di atas daya saing rata-rata dunia
10	Analisis Daya Saing Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Kediri (Wicaksono, Anindita dan Maulidah, 2017)	<i>Metode purposive sampling</i>	Hasil analisis harga paritas komoditas bawang merah lokal tidak memiliki daya saing terhadap komoditas bawang merah impor. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan analisis harga paritas yang menunjukkan bahwa harga bawang merah lokal (Rp. 7.418,75/kg) lebih tinggi dibandingkan dengan harga bawang merah impor (Rp. 3.309,98/kg) sehingga akan didapatkan nilai harga paritas sebesar 0,446.

11	Analisis Daya Saing Ekspor Pinang Provinsi Jambi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Sinaga, Napitupulu, dan Damayanti, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Revealed Comparative Advantaeg (RCA)</i></li> <li>- <i>Export Competitiveness Index (ECI)</i></li> </ul>	<p>Ekspor pinang Provinsi Jambi memiliki keunggulan dari segi komparatif, di mana nilai RCA dari tahun 1995-2013 memiliki nilai RCA lebih besar dari 1 kecuali tahun 1999</p> <p>Ekspor pinang Provinsi Jambi cenderung tidak memiliki keunggulan kompetitif yang dilihat dari nilai ECI kurang dari 1</p>
12	Penerapan Metode AHP ( <i>Analythic Hierarchy Process</i> ) untuk Menentukan Kualitas Gula Tumbu (Darmanto, Latifah dan Susanti, 2014)	Metode AHP ( <i>Analythic Hierarchy Process</i> )	<p>Aplikasi sistem penunjang keputusan yang digunakan untuk menentukan kualitas gula tumbu ini, sudah dapat melakukan perhitungan dengan metode AHP (<i>Analytic Hierarchy Process</i>) lebih cepat dibandingkan perhitungan secara manual sehingga bisa lebih efisien dan tingkat keakuratan data sudah mendekati sempurna</p>
13	Aplikasi <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) untuk Penentuan Strategi Pengembangan Subak (Sumiyati, Sutiarto dan Sudira, 2011)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWOT</li> <li>- AHP</li> </ul>	<p>Penilaian menggunakan AHP diperoleh hasil bahwa pengembangan subak sebagai daerah agroekowisata merupakan pilihan alternatif strategi yang mempunyai nilai (value) paling besar (0,471) dibandingkan dengan alternatif pengembangan sebagai daerah wisata massal (0,157) maupun sebagai daerah pertanian (0,372). Dengan pengembangan subak sebagai daerah agroekowisata diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sistem subak ditengah perkembangan pariwisata Bali, yang merupakan sinergi antara pariwisata dan pertanian.</p>
14	Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian dengan Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) dan <i>Shift Share</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Kota Malang) (Firmansyah, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)</li> <li>- <i>Shift Share</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilihat dari AHP dengan kriteria sektor unggulan perekonomian diantaranya penyerapan tenaga kerja, daya saing, teknologi, dan peluang investasi, sektor perdagangan hotel restoran menduduki prioritas pertama secara global dengan bobot 33,1%</li> <li>- Hasil analisis <i>shift share</i> untuk kontribusi PDRB Malang menunjukkan nilai positif pada enam sektor yang diteliti</li> </ul>



15	Perumusan Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan di Kabupaten Sidoarjo (Farikha, Widodo dan Gunarta, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LQ</li> <li>- <i>Shift share</i></li> <li>- SWOT</li> <li>- AHP</li> </ul>	- Sektor unggulan di Sidoarjo adalah sektor industri pengolahan dan terdapat 4 variabel yang mempengaruhi PDRB yaitu jumlah penduduk, tenaga kerja, nilai ekspor, UMK
----	---	---	---

Dari matriks penelitian terdahulu di atas persamaa dan perbedaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nomor Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Sama-sama menganalisis sektor potensial dan sektor basis	- Analisis data yang digunakan jurnal terdahulu adalah LQ, <i>Shift Share</i> , MRP, dan tipologi klassen sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis DLQ, RCA dan AHP
2	Sama-sama menganalisis sektor ekonomi unggulan	- Jurnal terdahulu menggunakan analisis LQ dan <i>Shift Share</i> sedangkan penelitian ini menggunakan DLQ, RCA, dan AHP
3	Sama-sama menganalisis sektor ekonomi unggulan	- Jurnal terdahulu menggunakan analisis LQ dan <i>Shift Share</i> sedangkan penelitian ini menggunakan DLQ, RCA, dan AHP
4	Sama-sama menganalisis sektor ekonomi unggulan	- Jurnal terdahulu menggunakan analisis LQ dan <i>Shift Share</i> sedangkan penelitian ini menggunakan DLQ, RCA, dan AHP
5	Sama-sama menganalisis sektor ekonomi unggulan	- Jurnal terdahulu menggunakan analisis LQ dan <i>Shift Share</i> dan MRP sedangkan penelitian ini menggunakan DLQ, RCA, dan AHP
6	Sama-sama menganalisis daya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam jurnal terdahulu menganalisis daya saing ekonomi sedangkan dalam penelitian ini menganalisis sektor potensial</li> <li>- Analisis yang digunakan dalam jurnal terdahulu menggunakan deskriptif kualitatif dan tipologi klassen sedangkan penelitian ini menggunakan DLQ, RCA dan AHP</li> </ul>
7	Sama-sama menganalisis daya saing	- Dalam jurnal terdahulu menganalisis komoditas kelapa sedangkan dalam penelitian ini tidak

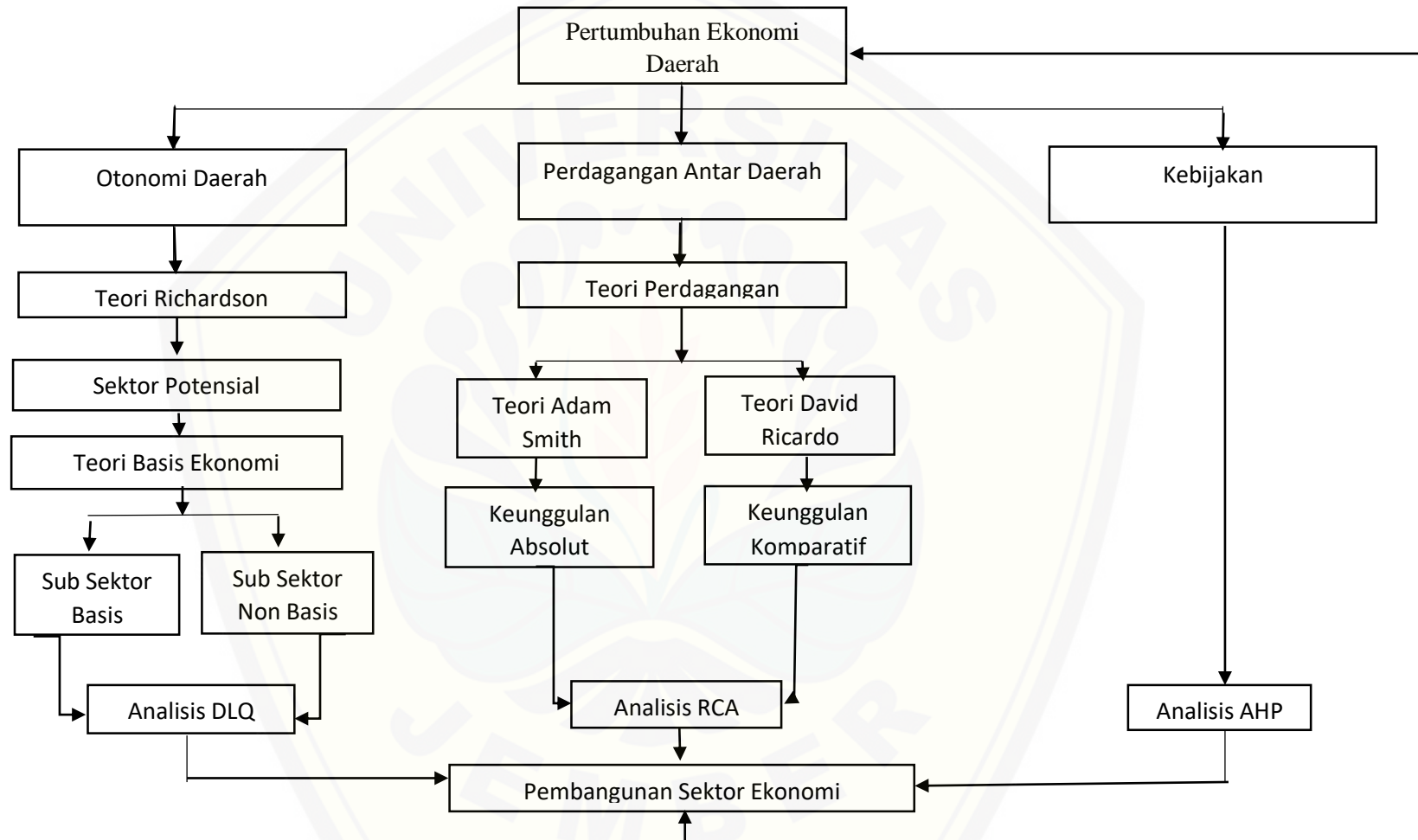
		- Analisis yang digunakan jurnal tersebut PAM sedangkan penelitian ini DLQ, RCA dan AHP
8	Sama-sama menganalisis daya saing	- Jurnal tersebut hanya menggunakan alat analisis OLS sedangkan penelitian ini menggunakan DLQ, RCA dan AHP
9	- Sama-sama menganalisis daya saing komoditi unggulan - Sama-sama menggunakan alat analisis RCA	- Jurnal tersebut hanya menggunakan alat analisis RCA sedangkan penelitian ini menggunakan DLQ, RCA dan AHP
10	- Sama-sama menganalisis daya saing suatu komoditas	- Alat analisis yang digunakan jurnal tersebut adalah metode <i>purposive sampling</i> sedangkan dalam penelitian ini RCA, DLQ dan AHP
11	- Sama-sama menganalisis daya saing - Menggunakan alat analisis RCA	- Alat analisis yang digunakan RCA dan ECI sedangkan dalam penelitian ini DLQ, RCA dan AHP
12	Sama-sama menggunakan AHP	- Dalam jurnal tersebut menggunakan sistem penunjang keputusan sedangkan dalam penelitian ini tidak
13	Sama-sama menggunakan alat analisis AHP	- Alat analisis dalam jurnal tersebut SWOT dan AHP sedangkan penelitian ini RCA, DLQ, AHP
14	Sama-sama menganalisis sektor unggulan dengan AHP	- Selain AHP dalam jurnal tersebut menggunakan analisis <i>shift share</i> sedangkan dalam penelitian ini menggunakan RCA, DLQ, dan AHP
15	Sama-sama menganalisis sektor unggulan dan merumuskan strategi menggunakan AHP	- Alat analisis yang digunakan dalam jurnal tersebut LQ, <i>Shift share</i> , SWOT, AHP

### 2.3 Kerangka Konseptual

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan nasional. Pertumbuhan daerah dapat ditingkatkan dengan pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya. Otonomi daerah merupakan wewenang yang dapat menunjang daerah dalam mengurus daerahnya. Otonomi daerah membantu pemerintah daerah untuk menentukan sektor potensial di daerahnya guna membantu dalam perdagangan. Sektor potensial harus memiliki keunggulan komparatif yang ditentukan berdasarkan kecilnya biaya produksi dan keunggulan absolut yang berdasarkan faktor produksinya. Daya saing komoditi di suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan analisis RCA.

Analisis DLQ digunakan untuk menentukan sektor yang termasuk dalam sektor basis dan non basis. Sektor potensial daerah yang dapat bersaing di pasar lokal akan mampu membawanya ke pasar luar sehingga daerah tersebut dapat melakukan perdagangan antar daerah yang akan membentuk suatu kerja sama antar daerah. Kerja sama antar daerah tersebut akan saling membawa keuntungan bagi daerah yang melakukan kerja sama.

Perdagangan antar daerah dapat dibantu dengan intervensi pemerintah berupa kebijakan yang dianalisis menggunakan AHP. Perdagangan tersebut akan dapat membangun kerja sama daerah sehingga akan terjadi pembangunan ekonomi daerah yang nantinya dapat berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis data dalam penelitian yang berjudul “Analisis sektor potensial dan daya saing subsektor tanaman perkebunan di kabupaten jember” ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka sebagai hasil observasi atau pengukuran. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah metode *Dynamic Location Quotient (DLQ)* dan *Revealed Comparative Advantage (RCA)*. Metode kualitatif yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

##### 3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini membahas daya saing sektor potensial dalam perdagangan antar daerah. Penelitian ini memilih Kabupaten Jember sebagai objek penelitiannya dikarenakan Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang memiliki keunggulan dalam sumber daya alamnya. Periode yang dipilih dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2017.

##### 3.1.3 Unit Analisis

Unit analisis menjelaskan fokus dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini peneliti berfokus pada daya saing terhadap sektor potensial dalam perdagangan antar daerah yang ada di Kabupaten Jember.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

##### 3.2.1 Jenis Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 118) data adalah hasil pencatatan yang menghasilkan angka atau fakta dalam suatu penelitian yang dilakukan. Menurut Soeranto dan Arsyad (2003: 72-73) data adalah semua

hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk keperluan tertentu. Jenis data ada dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menyatakan mutu yang menghasilkan pernyataan atau kata-kata. Data kuantitatif adalah hasil observasi atau pengukuran yang berbentuk angka. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif.

### 3.2.2 Sumber Data

Berdasarkan cara pengumpulannya data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dan pengisian angket atau kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan dan digunakan organisasi yang bukan pengolahnya (Arsyad, 2003). Penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terdiri dari beberapa metode yang dapat digunakan antara lain angket, wawancara, kuesioner atau angket, tes dan analisis dokumen. Angket adalah metode yang dilakukan dengan pemberian pernyataan atau pernyataan kepada responden. Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan pada objek penelitian secara sistematis terhadap unsur yang nampak. Analisis dokumen adalah cara pengumpulan dengan menganalisis dokumen yang diperlukan peneliti dikarenakan peneliti menganalisis dokumen yang sudah dipublikasikan atau tidak seperti dari BPS. Penelitian ini yang digunakan adalah pengumpulan data dengan kuesioner yang diberikan pada 10 responden dan dengan analisis dokumen yang didapatkan dari beberapa sumber yang dipublikasikan secara umum



### 3.4 Metode Analisis Data

#### 3.4.1 Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menganalisis potensi utama ekonomi daerah secara sektoral ataupun komoditi. Analisis ini digunakan untuk menghitung apakah potensi daerah tersebut merupakan sektor basis atau sektor non basis. Rumus yang digunakan dalam analisis LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n}$$

di mana  $E_{ij}$  merupakan sektor  $x$  di Kabupaten Jember,  $E_j$  adalah sektor total di Kabupaten Jember dan  $E_{in}$  merupakan sektor  $x$  di Jawa Timur,  $E_n$  adalah sektor total di Jawa Timur.

#### 3.4.2 Dynamic Location Quotient (DLQ)

Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) digunakan untuk menentukan dan mengetahui perubahan dari sektor dan sub sektor di masa yang akan datang di suatu daerah apakah masih bertahan sebagai sektor dan sub sektor basis atau sebaliknya (Hajeri, Yurisintae, Dolorosa, 2015). Rumus analisis DLQ adalah sebagai berikut (Riantika dan Utama, 2017):

$$DLQ = \left\{ \frac{(1+g_{ik})/(1+g_k)}{(1+G_i)/(1+G)} \right\}^t$$

di mana DLQ adalah *Dynamic Location Quotient*,  $g_{ik}$  adalah laju pertumbuhan sektor  $i$  di wilayah studi (Kabupaten Jember),  $g_k$  adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor di wilayah studi (Kabupaten Jember),  $G_i$  adalah laju pertumbuhan sektor  $i$  di wilayah referensi (provinsi Jawa Timur),  $G$  adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB di referensi (provinsi Jawa Timur),  $t$  adalah jumlah tahun yang akan di analisis.

Jika DLQ memiliki nilai sama dengan satu berarti potensi pertumbuhan wilayah sektor  $I$  terhadap potensi peningkatan PDRB Kabupaten Jember sama dengan potensi pertumbuhan suatu sektor pada provinsi Jawa Timur. Apabila nilai DLQ memiliki nilai kurang dari 1 maka potensi pertumbuhan sektor  $i$  terhadap potensi pertumbuhan

peningkatan PDRB Kabupaten Jember lebih kecil dibandingkan potensi pertumbuhan peningkatan sektor tersebut pada provinsi Jawa Timur. Apabila  $DLQ > 1$  maka potensi pertumbuhan daerah sektor I terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember lebih deras dibandingkan potensi peningkatan pertumbuhan pada provinsi Jawa Timur (Riantika dan Utama, 2017).

#### 3.4.3 *Revealed Comparative Advantage (RCA)*

Analisis ini digunakan untuk menentukan dan mengukur tingkat daya saing produk di pasar ekspor dari suatu negara atau daerah. Analisis RCA dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Satryana dan Karmini, 2016):

$$RCA = \frac{X_{ij}/X_j}{X_{iw}/X_w}$$

di mana  $X_{ij}$  adalah nilai ekspor komoditi X oleh Kabupaten Jember,  $X_j$  adalah nilai ekspor total Kabupaten Jember,  $X_{iw}$  adalah nilai ekspor total provinsi Jawa Timur komoditas X,  $X_w$  adalah nilai ekspor total provinsi Jawa Timur.

Jika indeks hasil persamaan RCA dengan nilai sama atau lebih dari satu ( $RCA \geq 1$ ) berarti bahwa Kabupaten Jember memiliki daya saing suatu produk di atas rata-rata provinsi Jawa Timur (kuat) dan apabila indeks RCA menunjukkan nilai kurang dari satu ( $RCA < 1$ ) maka daya saing suatu produk dari negara tersebut di bawah rata-rata dunia (lemah).

#### 3.4.4 *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Metode AHP adalah alat untuk menentukan keputusan yang menjadi prioritas terhadap alternatif dari permasalahan yang ada. Metode ini membantu pemecahan permasalahan yang kompleks dengan membuat hirarki dari berbagai pertimbangan untuk mengembangkan bobot atau prioritas.

Tahapan-tahapan dalam AHP adalah sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
- b. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan, lalu kriteria, sub kriteria dan alternatif
- c. Membuat tabel perbandingan berpasangan kriteria dan subkriteria.
- d. Menentukan bobot relatif masing-masing dengan membuat tabel penilaian perbandingan berpasangan.
- e. Setelah pemberian bobot dilakukan uji konsistensi indeks dan rasio yang dapat mengarah pada ketidakkonsistennan jawaban yang diberikan responden yang dipilih.

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

di mana CI merupakan *Consistency Index* (rasio penyimpangan konsistensi),  $\lambda_{\max}$  adalah nilai eigen terbesar dari matriks berordo  $n$  dan  $n$  merupakan umlah elemen yang dibandingkan. Nilai CI nol jika terdapat standar dalam menyatakan apakah CI menunjukkan yang konsisten. Menurut Saaty jika matriks yang dihasilkan dari perbandingan secara acak merupakan matriks yang tidak konsisten sehingga didapatkan nilai *Consistency Index* atau *Random Index* (RI). Untuk menentukan tingkat konsistensi dapat membandingkan CI dan RI (Fahrozi, 2015).

$$CR = CI / RI$$

### 3.5 Definisi Operasional dan Pengukurannya

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati (observasi). Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 3.5.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses pengelolaan sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat (Arsyad, 1999:298). Pembangunan ekonomi daerah dalam penelitian ini

diukur dengan indikator perkembangan PDRB berdasarkan harga berlaku dari tahun ke tahun yang dinyatakan dalam bentuk persen.

a. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas dasar harga dasar atas barang dan jasa berbagai unit berbeda dalam suatu daerah dengan jangka waktu tertentu ditambah pajak atas produk neto yang dihasilkan berbagai unit produksi (BPS, 2017).

b. Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan indikator subsektor ekonomi. Sektor ekonomi terdiri dari 17 sektor yaitu:

- 1) Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
- 2) Sektor pertambangan dan penggalian
- 3) Sektor industri pengolahan
- 4) Sektor listrik dan gas
- 5) Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang
- 6) Sektor konstruksi
- 7) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
- 8) Sektor transportasi dan pergudangan
- 9) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
- 10) Sektor informasi dan komunikasi
- 11) Sektor jasa keuangan dan asuransi
- 12) Sektor real estate
- 13) Sektor jasa perusahaan
- 14) Sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib
- 15) Sektor jasa pendidikan
- 16) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- 17) Sektor jasa lainnya.

c. Sektor Potensial

Sektor potensial atau sektor unggulan merupakan sektor yang memiliki keunggulan atau relatif lebih besar dari sektor lain dalam

wilayah tersebut (Elysanti, 2015). Sektor potensial dalam penelitian ini diukur dengan indikator sektor basis dan sektor non basis.

1) Sektor basis

Sektor basis adalah semua kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk daerahnya dengan menjual hasil produk atau jasa.

2) Sektor non basis

Sektor non basis adalah semua kegiatan yang dihasilkan untuk masyarakat dalam ruang lingkup daerah itu saja.

### 3.5.2 Daya Saing

Daya saing adalah kemampuan menawarkan produk dan layanan yang memiliki standar kualitas, harga pasar dan nilai baik untuk mendapatkan keuntungan sebagai pengganti sumber daya alam (Satryana dan Karmini, 2016). Daya saing dalam penelitian ini diukur dengan indikator keunggulan komparatif dan keunggulan absolut.

a. Keunggulan komparatif

Keunggulan komparatif adalah kemampuan produsen dalam menghasilkan produk dengan biaya relatif lebih rendah dari produsen lain.

b. Keunggulan absolut

Keunggulan absolut adalah kemampuan produsen dalam menghasilkan lebih banyak barang atau jasa dibandingkan produsen yang lain dengan jumlah sumber daya yang sama.

### 3.5.3 Kebijakan

Kebijakan adalah langkah untuk mengatasi masalah yang diambil oleh pihak berwenang. Penelitian ini kebijakan digunakan untuk mendukung daya saing sektor potensial dalam perdagangan antar daerah di Kabupaten Jember. Kebijakan dalam penelitian ini diukur dengan kebijakan kerja sama antar daerah. Penelitian ini kebijakan antar daerah yang digunakan ada 3, yaitu UU No 24 Tahun 2004 pasal 363, PP No 50 Tahun 2007 pasal 4 dan PP No 38 Tahun 2007 pasal 2 ayat 2.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Subsektor yang memiliki potensi pertumbuhan cepat di masa yang akan datang adalah sub sektor tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan jasa pertanian dan perburuan. Sedangkan sub sektor yang memiliki potensi pertumbuhan lambat adalah tanaman pangan, perternakan, kehutanan dan perikanan serta sub sektor pertambangan bijih logam.

Subsektor yang memiliki potensi pertumbuhan cepat adalah subsektor dari sektor pertanian hal tersebut dikarenakan sektor pertanian di Kabupaten Jember lebih dominan dari pada sektor lain dan luas lahan pertanian yang luas menjadi salah satu faktor subsektor pertanian memiliki potensi pertumbuhan cepat.

2. Jenis komoditi pada sub sektor tanaman perkebunan adalah tembakau, coklat dan karet. Komoditi tersebut yang memiliki daya saing paling tinggi adalah tembakau dengan nilai 5,45 dan diikuti oleh karet sebesar 0,74 dan coklat 0,01.

Komoditi tembakau merupakan komoditi yang memiliki tingkat daya saing paling tinggi dari pada komoditi lain hal tersebut dikarenakan luas tanaman perkebunan, produksi dan ekspor tembakau yang sangat banyak. Daya saing tinggi tersebut juga dipengaruhi karena tembakau merupakan komoditi unggul Kabupaten Jember yang produktivitasnya tinggi dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.



3. Alternatif yang memiliki prioritas tertinggi adalah alternatif kebijakan kerja sama antar daerah.

Kerja sama antar daerah memiliki nilai prioritas paling tinggi dikarenakan kerja sama antar daerah membantu suatu daerah memiliki hubungan kemitraan dalam perdagangan antar daerah sehingga dengan strategi peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya alam, promosi potensi daerah dan pemasaran produk akan mengalokasikan dengan maksimal untuk membantu dalam peningkatan produktivitas sektor potensial dan dapat bersaing sehingga menguasai pangsa pasar.

## 5.2 Saran

Hasil penelitian ini juga memberikan saran diantaranya, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan data yang akan digunakan terlebih dahulu agar tidak menghambat dalam proses analisis data.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas dalam pemilihan responden sehingga hasil analisis data lebih baik dan akurat.
3. Pemerintah diharapkan untuk lebih mendorong program kemitraan antara petani dan industri.
4. Pemerintah diharapkan meningkatkan bantuan subsidi bagi petani tembakau untuk membantu produktivitas tembakau.
5. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan investasi untuk keberhasilan peningkatan daya saing sektoral di Kabupaten Jember.

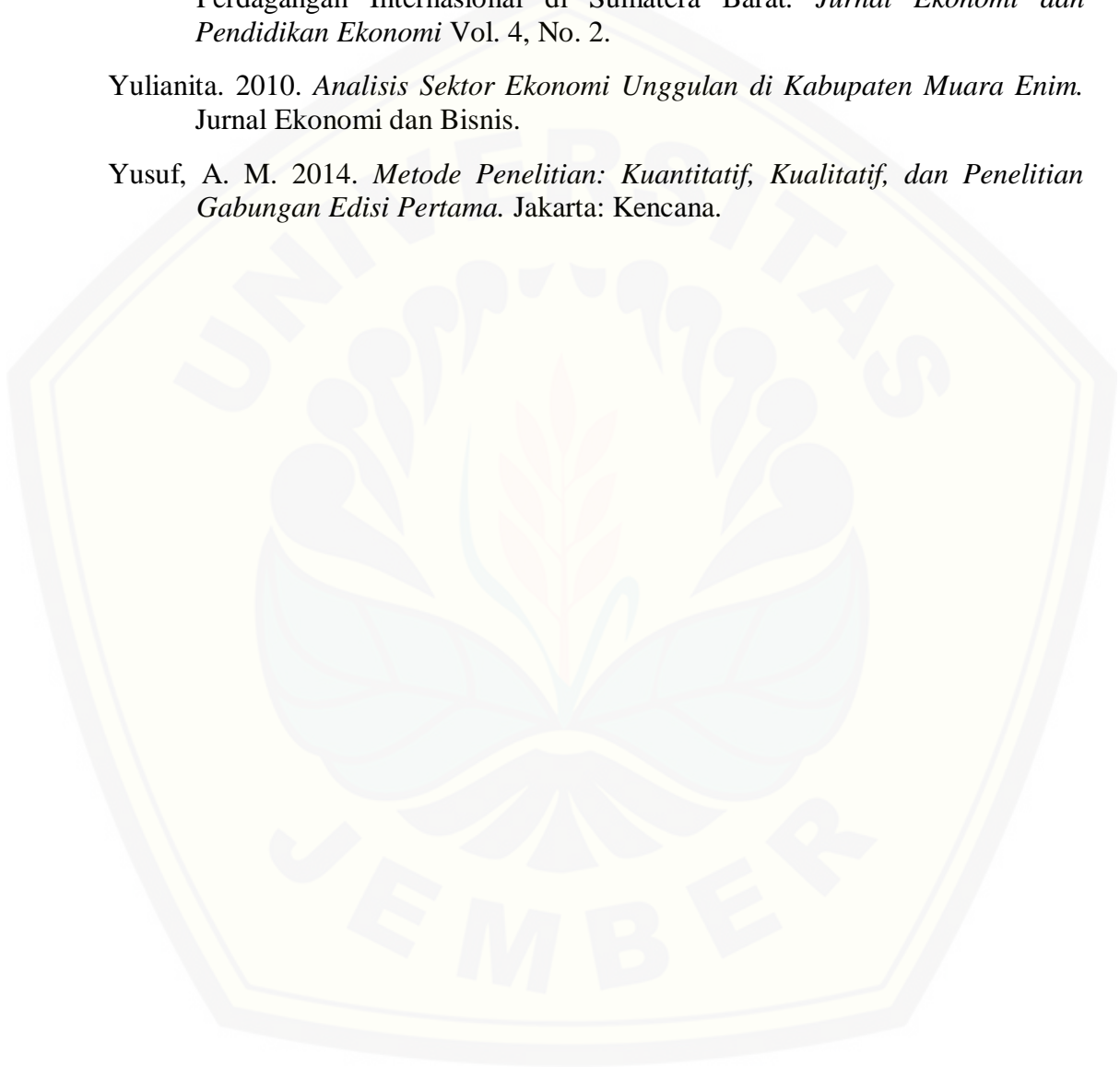
**DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, Ika D. 2013. Otonomi Daerah untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). *Jurnal Ilmu Mahasiswa* Vol. 3, No. 1.
- Arsyad, Linconlin. 1999. *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-4*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- BPS. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016*. Jember: Biro Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- BPS. 2016. *Produk Domesti Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- BPS. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016*. Jember: Biro Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- BPS. 2018. *Produk Domesti Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Darmanto, E. Latifah, N. Susanti, N. 2014. Penerapan Metode AHP (Analythic Hierarchy Process) untuk Menentukan Kualitas Gula Tumbu. *Jurnal Simetris*: Vol. 5 No. 1.
- Diana. Sulistiowati dan Hadi. 2007. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 1, Jilid 4, Hal 400-415.
- Diarto, H. Cahyo. 2018. Penentuan Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmi Ekonomi Pembangunan*.
- Fahrozi, W. 2016. Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Menentukan Ras Ayam Serama. *Jurnal Citec*: Vol. 3, No. 3.
- Farikha. Widodo dan Gunarta. 2017. *Perumusan Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan di Kabupaten Sidoarjo*.
- Firmansyah. 2013. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Shift Share terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Kota Malang). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Glasson, John. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Handayani, F. A. 2015. Implementasi Kebijakan Kerjasama Antar Daerah (Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di

- Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*: Vol. 3, No. 2.
- Haris, S. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Lippi Press.
- Hajeri. Yurisinthae, E. Dolorosa, E. 2015. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 4, No. 2, Hal 253-269.
- Jauchar B. 2012. Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Propinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Kewenangan Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan). *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 8 No. 1.
- Nadir, Sakinah. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal PolitikProfetik* Vol. 1, No. 1.
- Nurasa, T. Setiajie, I. 2008. Dampak Kebijakan Perdagangan Gula terhadap Profitabilitas Usahatani Tebu: Kasus di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *Jurnal Perdagangan* Vol. 11, No. 2.
- Nurkin, B. 2005. Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam: Kasus Pengelolaan Hutan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Perennial* Vol. 2 No. 1, Hal 25-30.
- Irawan, A. S. Tanpa Tahun. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan di SMA Islam Sudirman Ambarawa Menggunakan Metode AHP. *Jurnal Ilmiah*.
- Kornita, S. E. Yusuf, Y. Mayes, A. 2009. Analisis Perdagangan Komoditas Perikanan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ekonomi* Vo. 17, No. 2.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Salfadri. Tanpa Tahun. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perdagangan Antar Daerah Komoditas Ayam Potong di Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi*.
- Sarwono. 2014. Analisis Daya Saing Kedelai Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Satryana, M. Karmini, N. 2016. Analisis Daya Saing Ekspor The Indonesia ke Pasar ASEAN Periode 2004-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*.
- Setiawan, M. 2014. Analisis Sektor Ekonomi Basis dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu. *Jurnal Ilmiah*.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Setiawan. 2014. *Analisis Sektor Ekonomi Basis dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu*.
- Setiawan, Hartono dan Suryanti. 2014. *Analisis Daya Saing Komoditas Kelapa di Kabupaten Kupang*.
- Sevila, C. G., J. A. Ochave dan T.G. Punsalam. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Univeristas Indonesia.
- Sinaga, Napitupulu, Damayanti. 2017. Analisis Daya Saing Ekspor Pinang Provinsi Jambi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sukanto. 2009. Analisis Daya Saing Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika.
- Sukirnp, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumiyati, Sutiarmo dan Sudira. 2011. Aplikasi Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk Penentuan Strategi Pengembangan Subak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Taha, Hamdy A. 2007. *Riset Operasi jilid 2 Edisi Kelima*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Takamulang, Rumatte dan Lapina. 2018. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kepulauan Sangihe. *Jurnal Ilmiah*.
- Tarigan, R. 2015. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. Smith, Stephen C. Putra, Devri Barnadi. 2011. *Pembangunan Ekonomi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Trisanto. 2013. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dalam Pengembangan Potensi Perekonomian di Kota Blitar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Ustriaaji. 2016. Analisis Daya Saing Komoditi Ekspor Unggulan Indonesia di Pasar Internasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Wahyudi, A. Sari, M. 2011. Kerja Sama Antardaerah untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik di Kawasan Perbatasan. *Jurnal Borneo Administrator* Vo. 7, No. 3.
- Wicaksono, Anindita dan Mulidah. 2017. Analisis Daya Saing Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

- Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widoyoko, E. P. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yolamalinda. Utami, H. Y. Amaluis, D. 2016. Analisis Pemasaran dan Kebijakan Perdagangan Internasional di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Ekonomi* Vol. 4, No. 2.
- Yulianita. 2010. *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Muara Enim*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Yusuf, A. M. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.





## LAMPIRAN

## Lampiran 1.1 PDRB Kabupaten Jember

	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10.64 3,30	11.88 5,90	13.13 5,50	13.99 2,60	15.55 3,80	17.28 2,60	18.88 6,40	19.604,90
2	Pertambangan dan Penggalian	1.887, 70	2.057, 50	2.146, 60	2.226, 90	2.357, 10	2.533, 20	2.779, 60	2.987,50
3	Industri Pengolahan	6.900, 60	7.587, 90	8.601, 80	8.983, 60	10.03 9,20	11.19 8,00	12.21 8,90	13.417,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,20	17,60	18,20	18,90	21,80	24,30	27,20	32,40
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	21,50	23,10	25,90	29,40	33,00	36,20	40,00	43,80
6	Konstruksi	2.103, 40	2.401, 40	2.602, 80	3.087, 20	3.708, 80	4.148, 50	4.721, 50	5.273,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil	3.989, 30	4.333, 40	4.770, 10	5.467, 70	6.266, 00	7.096, 90	8.081, 00	9.006,20
8	Transportasi dan Pergudangan	469,0 0	520,0 0	574,8 0	676,3 0	796,8 0	907,8 0	1.032, 60	1.161,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	673,4 0	724,6 0	845,4 0	943,1 0	1.057, 60	1.207, 10	1.405, 00	1.571,20
10	Informasi dan Komunikasi	2.059, 50	2.290, 40	2.437, 60	2.706, 90	2.949, 30	3.358, 70	3.779, 50	4.149,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	675,8 0	772,5 0	927,6 0	1.058, 40	1.177, 40	1.320, 30	1.487, 60	1.600,30
12	Real Estate	436,7 0	497,5 0	554,9 0	26,09	710,1 0	788,4 0	868,3 0	929,50
13	Jasa Perusahaan	98,30	113,8 0	128,5 0	153,9 0	173,8 0	193,4 0	215,7 0	238,50
14	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.179, 60	1.354, 40	1.514, 10	1.647, 80	1.827, 70	1.981, 50	2.197, 40	2.335,70
15	Jasa Pendidikan	1.608, 40	1.873, 50	2.275, 70	2.594, 60	2.994, 80	3.250, 10	3.621, 50	3.880,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	215,3 0	259,4 0	296,1 0	352,9 0	365,4 0	417,0 0	464,1 0	515,30
17	Jasa Lainnya	395,7 0	445,6 0	470,8 0	515,2 0	569,4 0	633,3 0	687,4 0	728,50
<b>PDRB KABUPATEN JEMBER</b>		<b>33.37 4,70</b>	<b>37.15 8,50</b>	<b>41.32 6,40</b>	<b>44.48 1,49</b>	<b>50.60 2,00</b>	<b>56.37 7,30</b>	<b>62.51 3,70</b>	<b>67.476,00</b>

## Lampiran 1.2 PDRB Provinsi Jawa Timur

	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	133.504,56	146.768	168.232	186.038	208.613	230.942	249.457	258.428,10
2	Pertambangan dan Penggalian	54.020,53	65.699,30	66.133,80	73.777,30	78.535,10	66.526,20	69.900,30	80.846,20
3	Industri Pengolahan	292.708,39	326.628	365.694	397.997	445.279	495.751	536.442	586.258,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.491,98	5.617,30	6.016,40	5.168,10	5.612,30	5.948,50	6.204,40	6.675,20
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	1.075,88	1.178,60	1.264,50	1.367,50	1.434,50	1.573,40	1.705,10	1.853,10
6	Konstruksi	89.693,03	101.262	114.634	127.498	145.884	160.496	180.549	197.699,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil	174.755,50	201.380	220.633	244.743	266.734	297.616	333.996	367.185,20
8	Transportasi dan Pergudangan	27.082,43	31.264,20	35.923,70	42.435,20	50.000,70	56.632,80	62.775,40	69.176,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47.096,42	53.614,10	60.141,30	67.904,50	79.946,80	91.476,30	104.982	116.058,30
10	Informasi dan Komunikasi	47.548,21	52.160,60	59.013,50	66.085,80	69.883,10	77.087,40	85.149,80	92.928,70
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	22.070,51	25.503,90	30.517,50	36.441,10	41.204,80	46.388,50	51.575,90	55.033,10
12	Real Estate	16.306,30	18.428,30	20.116,90	22.540,30	24.123,30	27.560,80	29.907,40	32.080,20
13	Jasa Perusahaan	7.774,01	8.651,30	9.596,70	10.904,70	12.177,90	13.538,50	14.894,10	16.255,90
14	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	26.534,09	29.169,30	33.140,70	34.694,80	35.658,50	39.137,40	43.157,20	45.740,70
15	Jasa Pendidikan	24.944,81	28.004,40	32.880,70	37.680,70	41.970,80	46.006,20	49.554,90	52.974,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.408,94	6.492,30	7.455,80	8.431,40	9.682,70	10.654,10	11.527,50	12.611,70
17	Jasa Lainnya	15.633,25	16.753,20	17.371,50	18.791,30	21.205,10	24.140,20	25.827,10	27.395,10
<b>PDRB JAWA TIMUR</b>		<b>990.648,84</b>	<b>1.118.577,20</b>	<b>1.248.767,40</b>	<b>1.382.501,50</b>	<b>1.537.947,50</b>	<b>1.691.477,10</b>	<b>1.857.608,00</b>	<b>2.019.199,60</b>

## Lampiran 1.3 Nilai Ekspor Berdasarkan Jenis Komoditi Kabupaten Jember

No	Jenis Komoditi	Nilai					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Karet	22.661.729,45	30.643.042,08	18.006.303,17	15.618.000,00	11.652.303,3	-
2	Kopi	784.948,55	871.662,45	1.014.810,00	389.400,00	787.293,13	-
3	Coklat	76.048,88	1.987,50	27.444,38	513.700,00	1.039.198,74	-
4	Tembakau	<b>192.489.972,9</b>	<b>146.241.647,39</b>	<b>156.751.353,96</b>	<b>179.324.353,60</b>	<b>153.301.343,3</b>	<b>129.850.275,0</b>
	a. Na	34.480.778,62	65.566.463,51	82.931.772,06	-	-	-
	b. Voor Oogst	128.825.007,9	80.294.463,00	73.819.851,90	-	-	-
	c. Bobin	2.017.984,72	380.720,88	-	-	-	-
	d. Na Oogst+Voor Oogst	6.343.721,14	-	-	-	-	-
	e. Na Oogs	20.822.480,46	-	-	-	-	-
5	Panili	138.000,00	225.000,00	228.960,00	150.000,00	-	-
6	Edamame	5.442.098,00	7.194.852,20	7.901.000,00	7.981.968,00	5.923.025,00	8.843.676,00
7	Mukiname	1.187.717,24	1.111.372,80	-	-	-	-
8	Batu Piring	351.540,00	3.526.650.692,00	3.510.183.283	5.323.031.590	482.878,84	-
9	Terong Beku	-	-	-	-	-	386.320,00
1	Meubel	-	-	-	-	-	-
1	Okra	351.540,00	765.184,00	1.845.800.000	2.309.193,00	2.203.354,00	2.309.193,00
1	Patung	-	-	-	-	-	-
2	Sculpture	-	-	-	-	-	-
1	Cocofiber	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>223.132.055,0</b>	<b>3.712.940.256,42</b>	<b>5.539.913.154</b>	<b>5.529.318.204</b>	<b>175.389.396,3</b>	<b>141.617.221,0</b>

No	Jenis Komoditi	2016	Jenis Komoditi	2017
1	Karet	12.038.047,00	Karet	16.257.676,98
2	Kopi	247.571,40	Kopi	827.623,74
3	Coklat	547.582,13	Coklat	336.629,69
4	Tembakau	<b>113.516.617,00</b>	Tembakau	<b>61.144.274,23</b>
5	Panili	-	The	228.014,68
6	Edamame	9.907.494,00	Panili	-
7	Mukiname	-	Edamame	11.146.963,04
8	Batu Piring	-	Mukiname	-
9	Terong Beku	-	Batu Piring	364.623,81
10	Meubel	-	Terong Beku	-
11	Okra	3.193.088,90	Meubel	-
12	Garden Tile	-	Meubel Rotan	207.692,31
13	Patung Batu	-	Okra	4.333.059,40
14	Sculpture	-	Patung Batu	-
15	Cocofiber	-	Kerajinan Kayu	184.615,38
16	Buncis	533.961,00	Sabut Kelapa	55.769,23
			Buncis Beku	704.535,00
			Kripik Buah	55.384,62
			Alat Musik Kayu	39.461,54
	<b>Jumlah</b>	<b>139.984.415,43</b>		<b>96.886.323,65</b>

## Lampiran 1.4 PDRB Sub Sektor Basis Kabupaten Jember

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata	
<b>A</b> Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10.64 3,30	11.88 6,00	13.13 5,50	13.99 2,60	15.57 3,70	17.47 1,40	18.89 7,30	19.60 4,80	<b>15.15</b>	<b>0,</b>
1. Pertanian, Perternakan, Perburuan dan Jasa	9.647 ,50	10.81 3,70	11.83 4,00	12.58 4,20	14.01 6,00	15.73 7,00	16.99 3,60	17.50 3,10	<b>13.64</b>	<b>0,</b>
a. Tanaman Pangan	2.998 ,40	3.301 ,30	3.563 ,80	3.803 ,50	4.078 ,00	4.589 ,90	4.716 ,90	4.819 ,50	<b>3.983,</b>	<b>0,</b>
b. Tanaman Holtikultura	1.021 ,80	1.140 ,80	1.161 ,00	1.233 ,50	1.383 ,90	1.550 ,50	1.787 ,4	1.824 ,40	<b>1.330,</b>	<b>0,</b>
c. Tanaman Perkebunan	3.658 ,10	4.149 ,60	4.800 ,90	4.998 ,80	5.726 ,50	6.443 ,50	7.011 ,20	7.325 ,60	<b>5.514,</b>	<b>0,</b>
d. Perternakan	1.883 ,70	2.055 ,70	2.178 ,90	2.401 ,90	2.660 ,90	2.960 ,10	3.272 ,90	3.321 ,20	<b>2.591,</b>	<b>0,</b>
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	112,5 0	121,3 0	129,3 0	146,6 0	166,1 0	197,0 0	205,2 0	212,4 0	<b>161,3</b>	<b>0,</b>
2. Kehutanan	299,0 0	343,3 0	433,6 0	454,6 0	482,8 0	519,2 0	567,2	605,8	<b>463,1</b>	<b>0,</b>
3. Perikanan	669,8 0	729,0 0	867,9 0	953,7 0	1.075 ,00	1.215 ,30	1.336 ,50	1.496 ,00	<b>1.042,</b>	<b>0,</b>
<b>B</b> Pertambangan dan Penggalian	1.887 ,70	2.057 ,50	2.146 ,60	2.226 ,90	2.357 ,10	2.532 ,20	2.789 ,60	2.987 ,50	<b>2.373,</b>	<b>0,</b>
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Pertambangan Bijih Logam	9,10	10,30	10,40	10,70	10,90	10,20	11,3	11,95	<b>10,61</b>	<b>0,</b>
4. Pertambangan dan Penggalian	1.878 ,60	2.047 ,30	2.136 ,20	2.216 ,30	2.346 ,20	2.522 ,10	2.778 ,30	2.975 ,50	<b>2.362,</b>	<b>0,</b>
<b>J</b> Informasi dan Komunikasi	2.059 ,50	2.290 ,40	2.437 ,70	2.706 ,90	2.920 ,60	3.343 ,50	3.779 ,50	4.149 ,50	<b>2.960,</b>	<b>0,</b>
<b>O</b> Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	1.179 ,70	1.354 ,50	15.14 1,10	1.647 ,80	1.804 ,30	1.998 ,50	2.197 ,40	2.335 ,70	<b>3.457,</b>	<b>0,</b>
<b>P</b> Jasa Pendidikan	1.608 ,50	1.837 ,60	2.275 ,70	2.594 ,60	2.989 ,80	3.248 ,60	3.621 ,50	3.880 ,40	<b>2.757,</b>	<b>0,</b>
<b>Q</b> Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	215,3 0	259,5 0	296,2 0	325,9 0	373,5 0	427,0 0	464,1	515,2	<b>359,5</b>	<b>0,</b>
<b>Rata-Rata PDRB Subsktor Basis Kabupaten Jember</b>	<b>2.485</b> <b>,78</b>	<b>2.774</b> <b>,86</b>	<b>3.909</b> <b>,30</b>	<b>3.268</b> <b>,66</b>	<b>3.622</b> <b>,83</b>	<b>4.047</b> <b>,88</b>	<b>4.576</b> <b>,17</b>	<b>4.598</b> <b>,03</b>	<b>58.16</b>	<b>1.35</b>

## Lampiran 1.5 PDRB Sub Sektor Provinsi Jawa Timur

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata	
<b>A</b> Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	133.504,50	148.768,80	168.232,60	186.038,30	208.613,60	230.942,50	249.457,20	258.428,10	<b>197.998,20</b>	<b>0,23</b>
1. Pertanian, Perternakan, Perburuan dan Jasa	108.672,30	121.326,70	134.184,80	146.635,10	162.876,90	179.648,50	194.503,30	197.451,00	<b>155.662,33</b>	<b>0,18</b>
a. Tanaman Pangan	46.010,20	50.379,80	56.484,20	62.032,00	67.330,50	74.921,10	81.859,70	78.749,90	<b>64.720,93</b>	<b>0,08</b>
b. Tanaman Holtikultura	13.372,80	14.931,60	15.278,20	16.023,00	18.025,90	20.097,70	22.732,50	23.732,70	<b>18.024,30</b>	<b>0,02</b>
c. Tanaman Perkebunan	20.785,10	23.652,40	26.836,30	28.775,00	32.961,90	35.910,30	37.321,00	37.630,20	<b>30.484,03</b>	<b>0,04</b>
d. Perternakan	26.996,40	30.713,40	33.735,70	37.761,10	42.254,00	46.242,20	50.112,10	54.461,30	<b>40.284,53</b>	<b>0,05</b>
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1.507,60	1.649,50	1.850,40	2.044,00	2.304,60	2.447,30	2.748,00	2.876,80	<b>2.178,53</b>	<b>0,00</b>
2. Kehutanan	4.239,60	4.902,10	6.527,00	7.299,20	8.262,70	9.203,50	9.010,80	9.984,10	<b>7.428,63</b>	<b>0,01</b>
3. Perikanan	20.592,50	22.540,00	27.520,90	32.104,10	37.474,10	42.090,40	45.943,10	50.993,10	<b>34.907,28</b>	<b>0,04</b>
<b>B</b> Pertambangan dan Penggalian	54.020,50	65.699,30	66.133,80	73.777,30	78.535,10	66.526,20	69.900,30	80.846,20	<b>69.429,84</b>	<b>0,08</b>
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	36.927,20	47.019,40	46.585,50	53.195,00	54.741,60	40.428,90	41.779,40	50.540,10	<b>46.402,14</b>	<b>0,06</b>
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Pertambangan Bijih Logam	433,3	527,4	543,4	518,5	630,8	518,1	529,3	557,3	<b>532,26</b>	<b>0,00</b>
4. Pertambangan dan Penggalian	16.659,90	18.152,50	19.005,00	20.063,70	23.162,70	25.579,20	27.591,60	29.748,80	<b>22.495,43</b>	<b>0,03</b>
<b>J</b> Informasi dan Komunikasi	47.548,20	52.160,60	59.013,50	66.085,80	69.883,10	77.087,40	85.149,80	92.928,70	<b>68.732,14</b>	<b>0,08</b>
<b>O</b> Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	26.534	29.169,30	33.140,70	34.694,80	35.658,50	39.137,40	43.157,20	45.740,70	<b>35.904,08</b>	<b>0,04</b>
<b>P</b> Jasa Pendidikan	24.944,80	28.004,40	32.880,70	37.680,70	41.970,80	46.006,20	49.544,90	52.974,10	<b>39.250,83</b>	<b>0,05</b>
<b>Q</b> Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.408,90	6.492,30	7.455,80	8.431,40	9.628,70	10.654,10	11.527,50	12.611,70	<b>9.026,30</b>	<b>0,01</b>
<b>Rata-Rata PDRB Subsktor Basis Jawa Timur</b>	<b>32.675,43</b>	<b>37.004,97</b>	<b>40.856,03</b>	<b>45.175,50</b>	<b>49.684,19</b>	<b>52.635,61</b>	<b>56.825,98</b>	<b>60.014,16</b>	<b>843.461,73</b>	



## Lampiran 1.6 Data Ekspor Berdasarkan Jenis Komoditi Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember

Data Ekspor Jenis Komoditi Sub Sektor Basis Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2017 (US\$)

KOMODI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	X
Biji Coklat	110.328.870,00	42.820.110,00	21.543.040,00	31.553.330,00	132.105.617,00	238.702.359,00	312.938.043,54	298.970.876,67	876.024.202,67
Karet Alam	15.412.979,00	5.662.917,00	994.698,00	1.689.803,00	406.263.718,00	332.898.208,00	321.542.210,21	446.102.231,45	1.530.566.764,66
Tembakau	68.253.586,00	54.756.993,00	57.407.163,00	92.799.891,00	405.321.781,00	389.332.418,00	476.567.915,47	440.670.765,87	1.985.110.513,34
<b>Jumlah</b>	<b>15.340.476.475,00</b>	<b>19.062.771.105,00</b>	<b>16.249.221.758,0</b>	<b>15.562.857.021,0</b>	<b>18.767.262.207,00</b>	<b>17.120.185.401,00</b>	<b>18.953.016.809,00</b>	<b>19.613.196.004,00</b>	<b>140.668.986.780,00</b>

Data Ekspor Jenis Komoditi Sub Sektor Basis Kabupaten Jember Tahun 2010-2017 (US\$)

KOMODITI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Xij
Biji Coklat	76.048,88	1.987,50	27.444,38	513.700,00	1.039.198,74	—	547.582,13	336.629,69	2.542.591,32
Karet Alam	22.661.729,45	30.643.042,08	18.006.303,17	15.618.000,00	11.652.303,34	—	12.038.047,00	16.257.676,98	126.877.102,02
Tembakau	192.489.972,91	146.241.647,39	156.751.353,96	179.324.353,60	153.301.343,30	129.850.275,00	113.516.671,00	61.144.274,23	1.132.619.891,39
<b>Jumlah</b>	<b>223.132.055,03</b>	<b>3.712.940.256,42</b>	<b>5.539.913.154,51</b>	<b>5.529.318.204,60</b>	<b>175.389.396,35</b>	<b>141.617.221,00</b>	<b>139.984.415,43</b>	<b>96.886.323,65</b>	<b>15.559.181.026,99</b>

KOMODITI	Xiw/Xw	Xij/Xj	RCA	Keterangan
Biji Coklat	0,0062276	0,0001634	0,026240	Daya saing lemah
Karet Alam	0,0108806	0,0081545	0,7494499	Daya saing lemah
Tembakau	0,0141119	0,0727943	5,1583537	Daya saing kuat

**Lampiran 1.7** Kuesioner

**Data Responden**

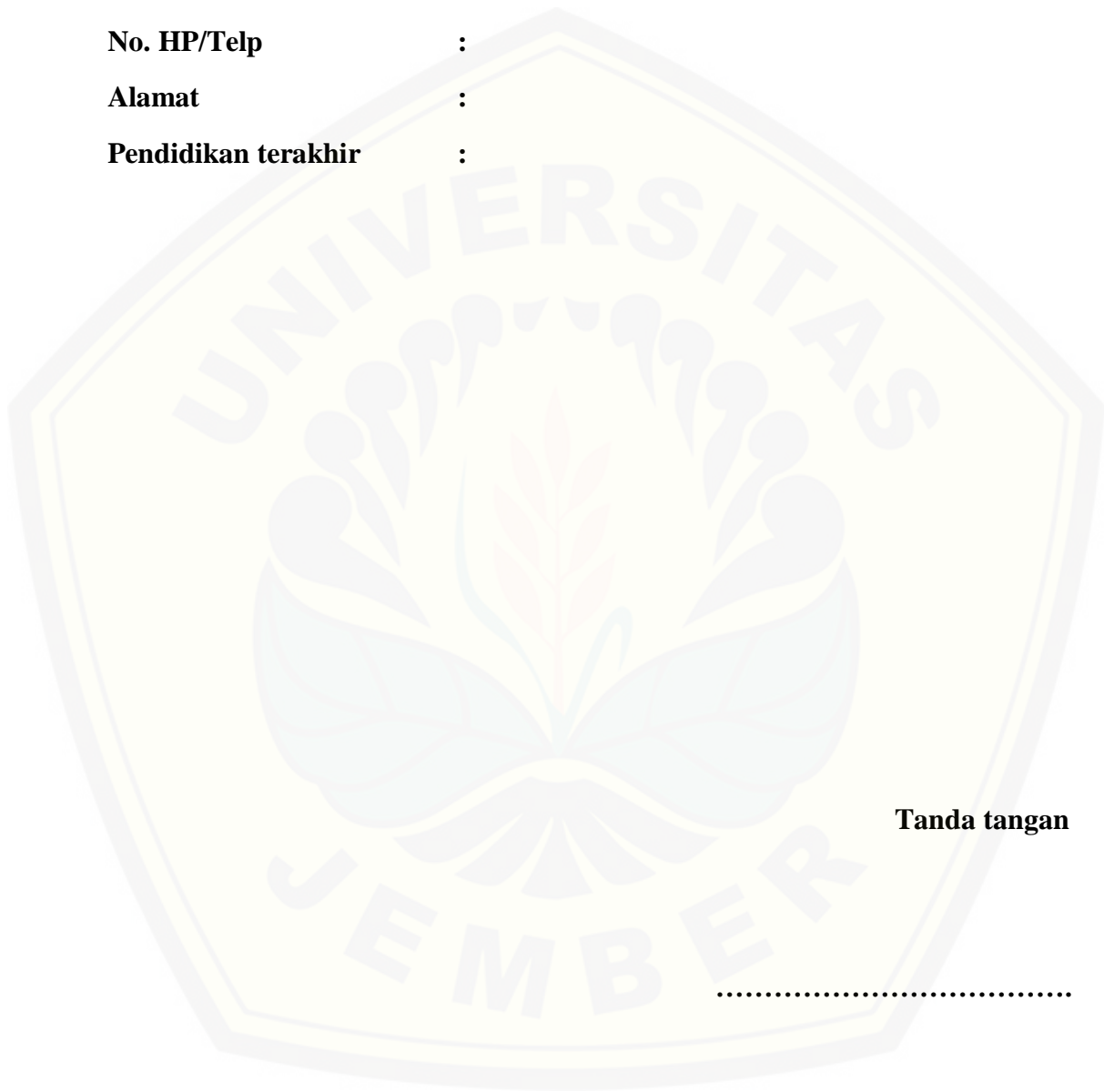
**Nama lengkap** :

**Jabatan** :

**No. HP/Telp** :

**Alamat** :

**Pendidikan terakhir** :



**Tanda tangan**

.....

**KUESIONER ANALITICAL HIERARCHI PROCESS (AHP) BAGI  
RESPONDEN DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENINGKATAN  
DAYA SAING SEKTORAL DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2009-2017**

Struktur hirarki dalam pengisian kuesioner berikut terdiri dari :

- 1) Level pertama adalah tujuan atau goal yakni kebijakan peningkatan daya saing sektoral di Kabupaten Jember Tahun 2009-2017.
- 2) Level kedua adalah kriteria yang digunakan dalam menentukan kebijakan, yang terdiri dari:
  - a. **Kelayakan administratif** yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan kebijakan agar dapat memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.
  - b. **Kelayakan teknis** yaitu kemampuan kinerja program kebijakan dapat berlangsung di suatu daerah.
  - c. **Kelayakan ekonomi dan finansial** yaitu kemampuan kebijakan dalam menyeimbangan pengeluaran dan pemasukan pendapatan daerah.
  - d. **Keuntungan Publik** yaitu bagaimana dampak kebijakan bagi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Level ketiga adalah subkriteria yang merupakan bagian dari kriteria digunakan dalam menentukan kebijakan, yang terdiri dari:
  - a1. Otoritas pemerintah daerah
  - a2. Implementasi regulasi
    - b1. Efektivitas
    - b2. Daya saing komoditas
  - c1. Efisiensi biaya (dana)
  - c2. Pendapatan daerah
    - d1. Kesejahteraan
    - d2. Pemerataan pembangunan ekonomi
- 4) Tingkatan keempat adalah alternative yang merupakan kebijakan peningkatan daya saing sektoral berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Kebijakan peningkatan daya saing sektoral dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Kerja sama antar daerah

Kebijakan ini didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 363 yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh daerah dengan: a. daerah lain; b. pihak ketiga; c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

b. Penguatan fiskal dan moneter

Kebijakan ini didasarkan pada PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi:

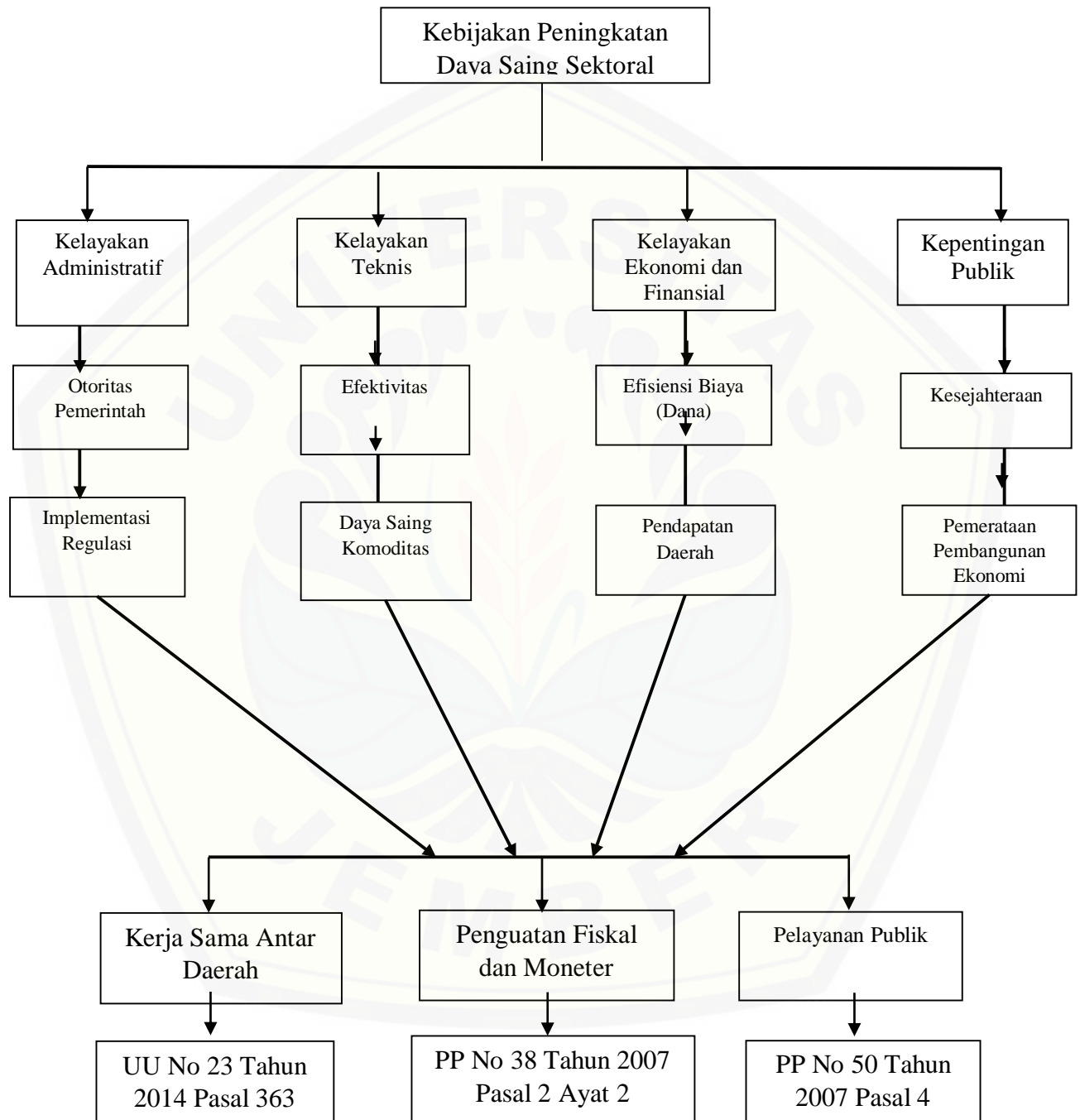
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

c. Pelayanan publik

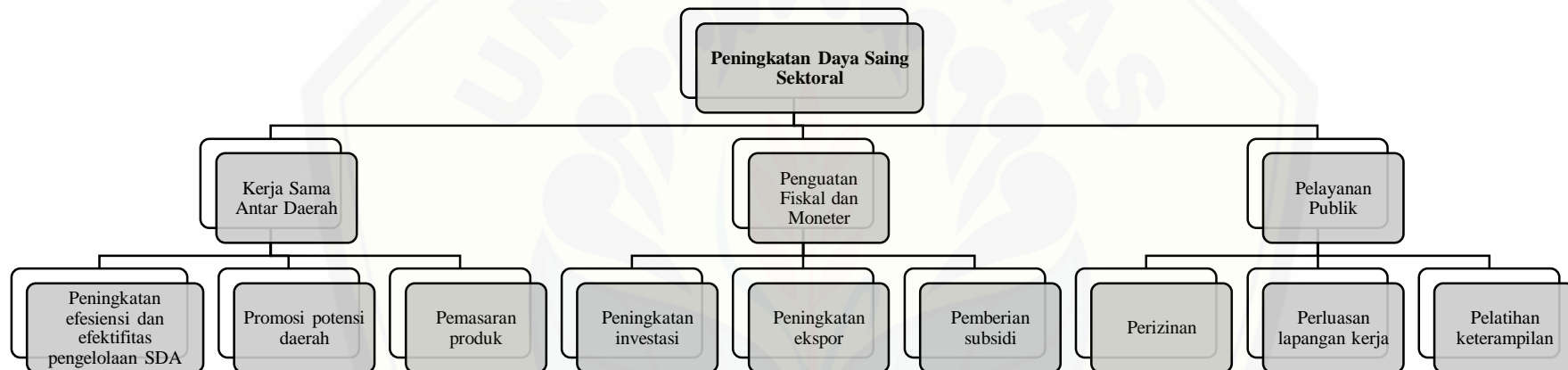
Kebijakan ini didasarkan pada PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Pasal 4 yang berbunyi:

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Berikut susunan struktur AHP mengenai penentuan kebijakan yang mendukung daya saing sektor potensial di Kabupaten Jember.







**Petunjuk pengisian kuesioner AHP**

Intensitas pentingnya	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	A dan B sama penting
3	Sedikit lebih penting	A sedikit lebih penting dari B
5	Agak lebih penting	A agak sedikit penting dari B
7	Jauh lebih penting	A jauh lebih penting dari B
9	Mutlak lebih penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai antara angka diatas	Ragu-ragu dalam menentukan skala missal 6 antara 5 dan 7
Reciprocal	Jika $A/B=9$ maka $B/A=1/9$	Asumsi masuk akal

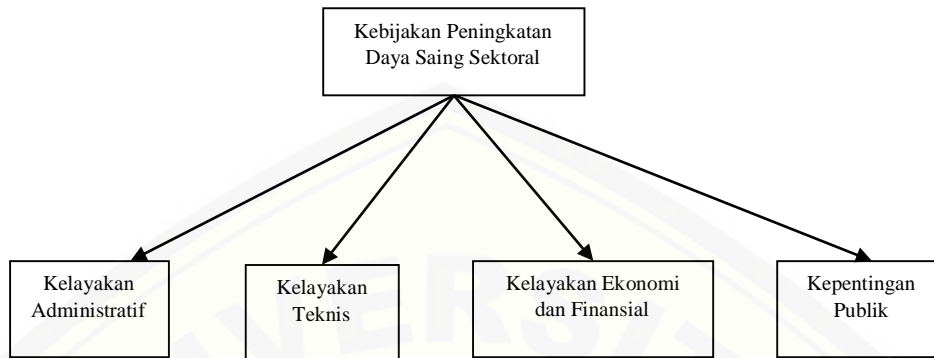
Setiap responden memilih jawaban dengan membandingkan tingkat prioritas kepentingan (antara 1 sampai dengan 9) dari kedua kriteria dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu kolom bobot nilai tersebut, seperti contoh dibawah ini:

Manakah yang lebih prioritas atas pilihan di bawah ini?

Kriteria a	9	8	7	6	5	4	<del>3</del>	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kriteria b
Kriteria a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<del>5</del>	6	7	8	9	Kriteria c

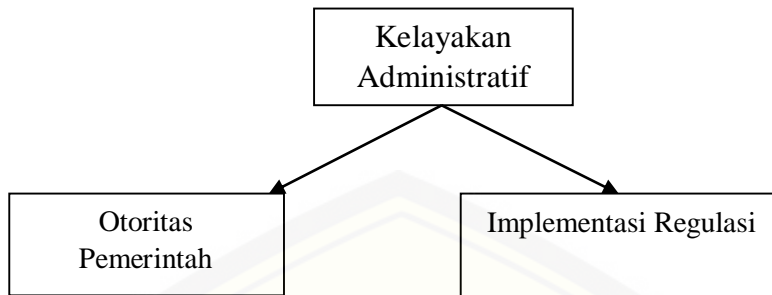
Jawaban : untuk baris pertama, jika kriteria a lebih penting dari b dengan bobot 3, artinya kriteria a “sedikit lebih penting” di bandingkan dengan pilihan b, untuk baris kedua, jika kriteria c lebih penting dari kriteria dari a dengan bobot 5, artinya kriteria c “kuat pentingnya” di bandingkan kriteria

**KUESIONER**



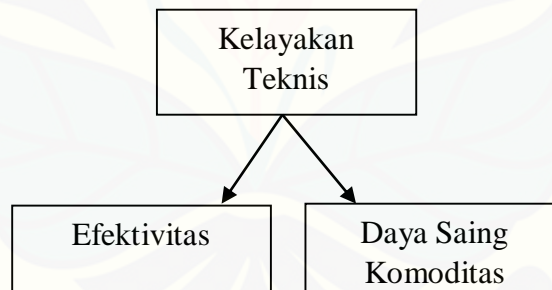
Dari gambar diatas membandingkan antara masing-masing kriteria dalam menentukan kebijakan peningkatan daya saing sektoral menurut bapak/ibu kriteria manakah yang paling prioritas/paling penting dalam memilih kebijakan tersebut? (bandingkan beberapa kriteria pada kolom 1 dengan beberapa kriteria pada kolom 2).

Kriteria prioritas kebijakan peningkatan daya saing sektoral																		Kriteria prioritas kebijakan peningkatan daya saing sektoral
Kelayakan Administratif	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kelayakan Teknis
Kelayakan Administratif	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kelayakan Ekonomi dan Finansial
Kelayakan Administratif	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepentingan Publik
Kelayakan Teknis	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kelayakan Ekonomi dan Finansial
Kelayakan Teknis	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepentingan Publik
Kelayakan Ekonomi dan Bisnis	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepentingan Publik



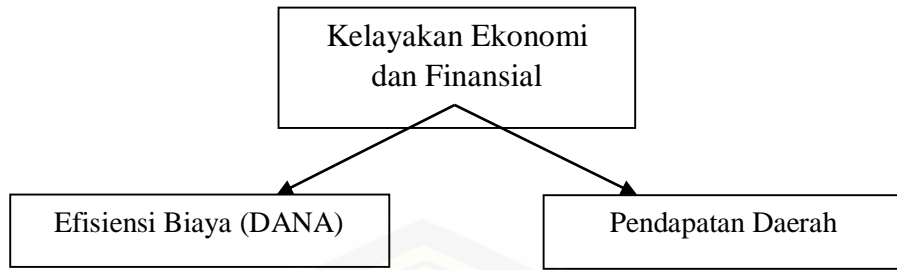
Dari gambar diatas membandingkan antar subkriteria kelayakan administratif, menurut bapak/ibu manakah subkriteria yang lebih prioritas? (bandingkan subkriteria pada kolom 1 dengan subkriteria pada kolom 2).

Subkriteria prioritas Kelayakan Administratif																			Subkriteria prioritas Kelayakan Administratif
Otoritas Pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Implementasi Regulasi	



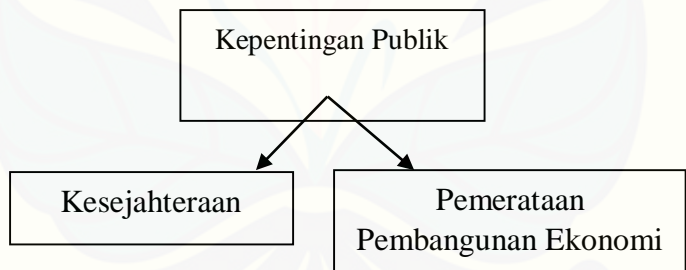
Dari gambar diatas membandingkan antar subkriteria kelayakan teknis, menurut bapak/ibu manakah subkriteria yang lebih prioritas? (bandingkan subkriteria pada kolom 1 dengan subkriteria pada kolom 2).

Subriteria prioritas kelayakan teknis																			Subriteria prioritas kelayakan teknis
Efektivitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daya saing komoditas	



Dari gambar diatas membandingkan antar subkriteria kelayakan ekonomi dan finansial, menurut bapak/ibu manakah subkriteria yang lebih diprioritaskan? (bandingkan subkriteria pada kolom 1 dengan subkriteria pada kolom 2).

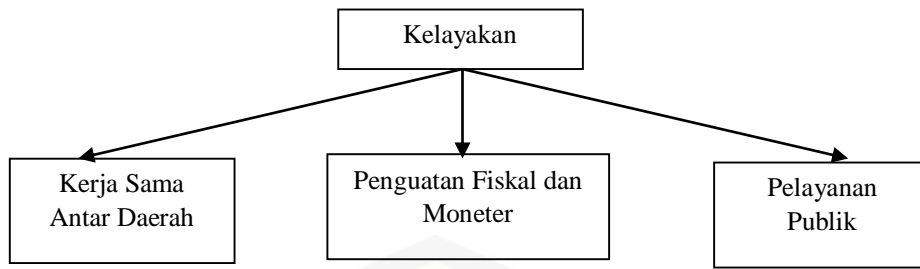
Subkriteria prioritas Kelayakan Ekonomi dan Finansial																			Subkriteria prioritas Kelayakan Ekonomi dan Finansial
Efisiensi Biaya (dana)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pendapatan Daerah	



Dari gambar diatas membandingkan antar subkriteria kepentingan publik, menurut bapak/ibu manakah subkriteria yang lebih diprioritaskan? (bandingkan beberapa subkriteria pada kolom 1 dengan beberapa subkriteria pada kolom 2).

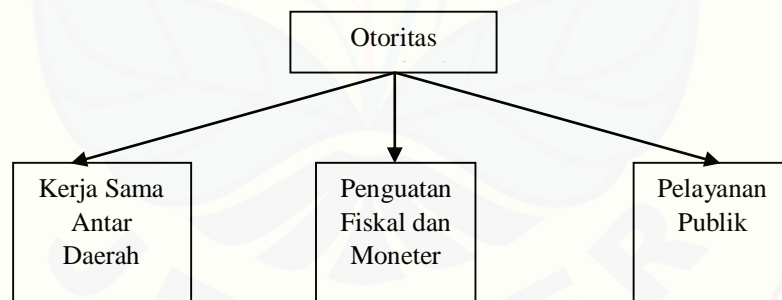
Subkriteria prioritas kepentingan publik																			Subkriteria a prioritas kepentingan publik
Kesejahteraan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerataan pembangunan ekonomi	





Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan dalam kelayakan administratif di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada kolom 2).

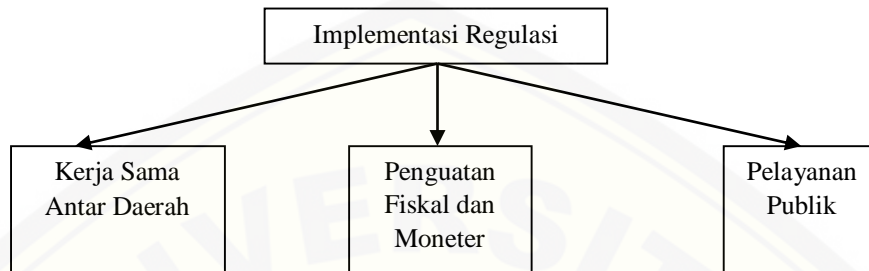
Alternatif prioritas kelayakan administratif																				Alternatif prioritas kelayakan administratif
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan fiskal dan moneter		
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik		
Penguatan fiskal dan moneter	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik		



Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan dalam otoritas pemerintah di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada kolom 2).

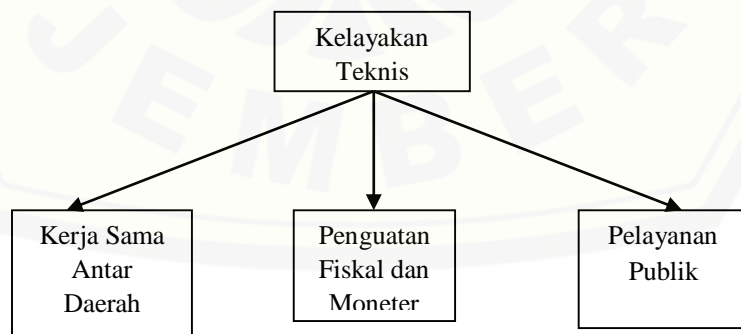
Alternatif prioritas otoritas pemerintah																				Alternatif prioritas otoritas pemerintah
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan fiskal dan moneter		

Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik
Penguatan fiskal dan moneter	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik



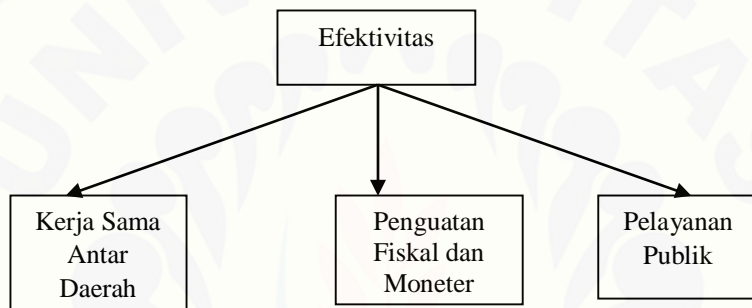
Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan dalam kemampuan pemerintah Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada kolom 2).

Alternatif prioritas implementasi regulasi																		Alternatif prioritas implementasi regulasi
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan fiskal dan moneter
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik
Penguatan fiskal dan moneter	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik



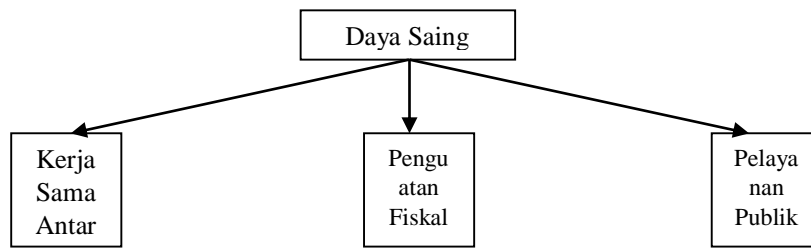
Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan yang memiliki kelayakan teknis di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada kolom 2).

Alternatif prioritas kelayakan teknis																			Alternatif prioritas kelayakan teknis
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan fiskal dan moneter	
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	
Penguatan fiskal dan moneter	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	



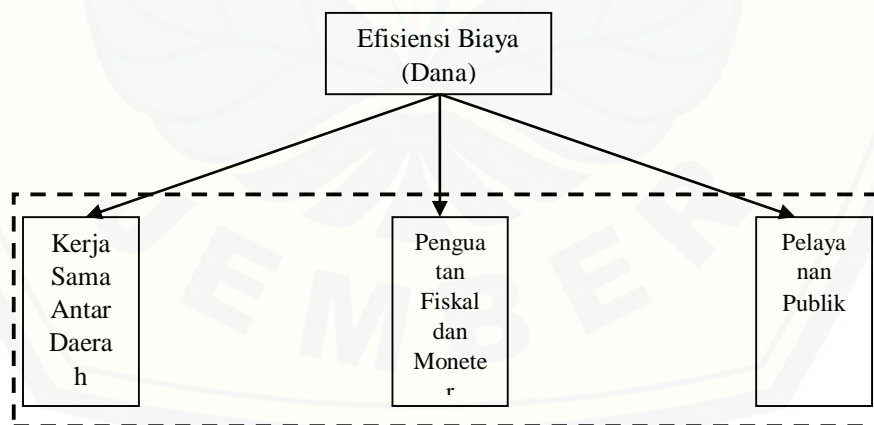
Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan dalam efektivitas di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada kolom 2).

Alternatif prioritas efektivitas																			Alternatif prioritas efektivitas
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan fiskal dan moneter	
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	
Penguatan fiskal dan moneter	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	



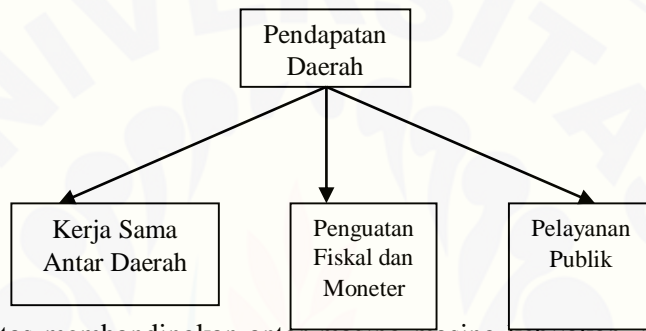
Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan yang memiliki daya saing komoditas di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada kolom 2).

Alternatif prioritas daya saing komoditas																			Alternatif prioritas daya saing komoditas
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan fiskal dan moneter	
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	
Penguatan fiskal dan moneter	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	



Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan yang memiliki efisiensi biaya di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada kolom 2).

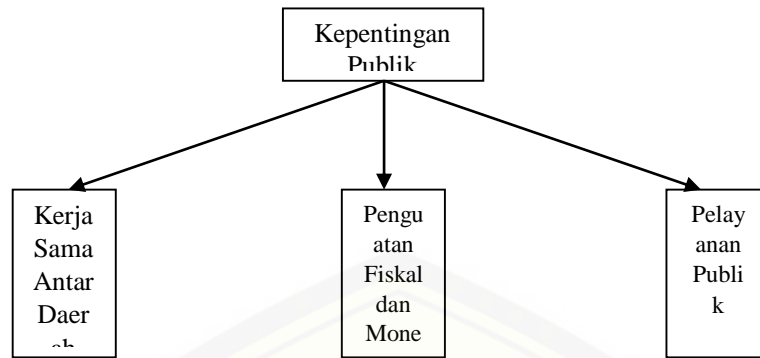
Alternatif prioritas pendapatan daerah																			Alternatif prioritas pendapatan daerah
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan fiskal dan moneter	
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	
Penguatan fiskal dan moneter	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	



Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan yang memiliki pendapatan daerah di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada kolom 2).

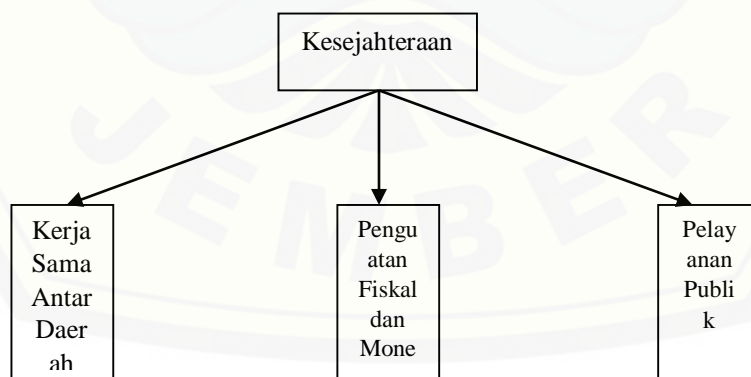
Alternatif prioritas efisiensi biaya (dana)																			Alternatif prioritas efisiensi biaya (dana)
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan fiskal dan moneter	
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	
Penguatan fiskal dan moneter	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	





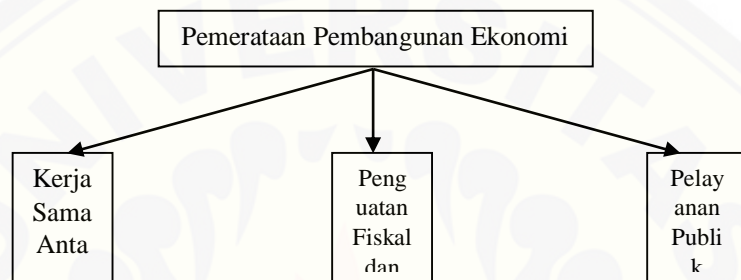
Dari gambar diatas ini membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan memiliki kepentingan publik di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada kolom 2).

Alternatif prioritas kepentingan publik																				Alternatif prioritas kepentingan publik
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan fiskal dan moneter		
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik		
Penguatan fiskal dan moneter	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik		



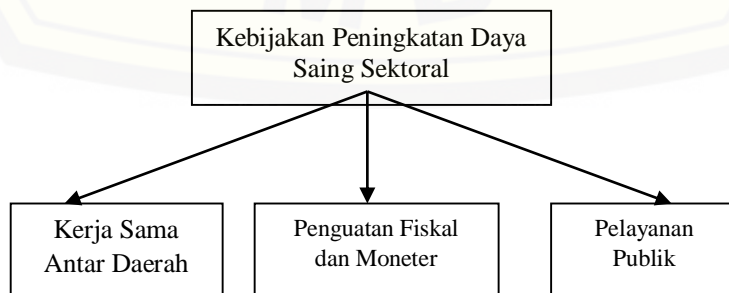
Dari gambar diatas ini membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan memiliki kesejahteraan di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada kolom 2).

Alternatif prioritas kesejahteraan																			Alternatif prioritas kesejahteraan
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan fiskal dan moneter	
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	
Penguatan fiskal dan moneter	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	



Dari gambar diatas ini membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan memiliki pemerataan pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada kolom 2).

Alternatif prioritas pemerataan pembangunan ekonomi																			Alternatif prioritas pemerataan pembangunan ekonomi
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan fiskal dan moneter	
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	
Penguatan fiskal dan moneter	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan publik	



Dari gambar diatas ini membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan sebagai kebijakan kerja sama antar daerah di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada kolom 2).

Alternatif prioritas kebijakan kerja sama antar daerah																				Alternatif prioritas kerja sama antar daerah
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			Penguatan fiskal dan moneter
Kerja sama antar daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			Pelayanan publik
Penguatan fiskal dan moneter	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			Pelayanan publik

Lampiran 1.8 Pengujian Analisis AHP

Kriteria

Responden 1					Responden 2					Responden 3					Responden 4					Reponden 5				
C	K.a dm	K.t ek	K.f in	K.p ub	C	K.a dm	K.t ek	K.f in	K.p ub	C	K.a dm	K.t ek	K.f in	K.p ub	C	K.a dm	K.t ek	K.f in	K.p ub	C	K.a dm	K.t ek	K.f in	K.p ub
K.ad m	1,0	0,1	0,1	7,0	K.ad m	1,0	0,1	0,1	4,0	K.ad m	1,0	0,1	0,1	0,1	K.ad m	1,0	0,1	0,1	0,2	K.ad m	1,0	1,0	3,0	3,0
K.te k	8,0	1,0	0,1	7,0	K.te k	7,0	1,0	0,1	5,0	K.te k	7,0	1,0	7,0	6,0	K.te k	7,0	1,0	0,1	6,0	K.te k	1,0	1,0	0,3	3,0
K.fi n	7,0	8,0	1,0	6,0	K.fi n	7,0	6,0	1,0	6,0	K.fi n	6,0	0,1	1,0	0,1	K.fi n	7,0	7,0	1,0	6,0	K.fi n	0,3	3,0	1,0	0,3
k.pu b	0,1	0,1	0,1	1,0	k.pu b	0,2	0,2	0,1	1,0	k.pu b	6,0	0,1	6,0	1,0	k.pu b	5,0	0,1	0,1	1,0	k.pu b	0,3	0,3	3,0	1,0
<b>Jumlah</b>	<b>16,14</b>	<b>9,26</b>	<b>1,42</b>	<b>21,00</b>	<b>Jumlah</b>	<b>15,25</b>	<b>7,34</b>	<b>1,48</b>	<b>16,00</b>	<b>Jumlah</b>	<b>20,00</b>	<b>1,45</b>	<b>14,17</b>	<b>7,33</b>	<b>Jumlah</b>	<b>20,00</b>	<b>8,31</b>	<b>1,45</b>	<b>13,20</b>	<b>Jumlah</b>	<b>2,67</b>	<b>5,33</b>	<b>7,33</b>	<b>7,33</b>
Responden 6					Responden 7					Responden 8					Responden 9					Responden 10				
C	K.a dm	K.t ek	K.f in	K.p ub	C	K.a dm	K.t ek	K.f in	K.p ub	C	K.a dm	K.t ek	K.f in	K.p ub	C	K.a dm	K.t ek	K.f in	K.p ub	C	K.a dm	K.t ek	K.f in	K.p ub
K.ad m	1,0	0,3	2,0	0,2	K.ad m	1,0	5,0	5,0	3,0	K.ad m	1,0	0,2	0,1	0,1	K.ad m	1,0	0,3	0,2	0,5	K.ad m	1,0	0,2	0,3	0,3
K.te k	3,0	1,0	3,0	0,5	K.te k	0,2	1,0	0,3	0,3	K.te k	5,0	1,0	1,0	0,2	K.te k	3,0	1,0	0,2	0,2	K.te k	4,0	1,0	0,2	0,3
K.fi n	0,5	0,3	1,0	0,2	K.fi n	0,2	3,0	1,0	3,0	K.fi n	6,0	1,0	1,0	8,0	K.fi n	4,0	5,0	1,0	3,0	K.fi n	3,0	5,0	1,0	4,0
k.pu b	4,0	2,0	4,0	1,0	k.pu b	0,3	3,0	0,3	1,0	k.pu b	7,0	5,0	0,1	1,0	k.pu b	2,0	5,0	0,3	1,0	k.pu b	3,0	3,0	0,2	1,0
<b>Jumlah</b>	<b>8,50</b>	<b>3,67</b>	<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	<b>Jumlah</b>	<b>1,73</b>	<b>12,00</b>	<b>6,67</b>	<b>7,33</b>	<b>Jumlah</b>	<b>19,00</b>	<b>7,20</b>	<b>2,29</b>	<b>9,34</b>	<b>Jumlah</b>	<b>10,00</b>	<b>11,33</b>	<b>1,78</b>	<b>4,70</b>	<b>Jumlah</b>	<b>11,00</b>	<b>9,25</b>	<b>1,78</b>	<b>5,67</b>

Hasil Kali					Matriks Perbandingan Berpasangan					Normalisasi						
C	K.adm	K.tek	K.fin	K.pub	C	K.adm	K.tek	K.fin	K.pub	C	K.adm	K.tek	K.fin	K.pub	Jumlah	PV
K.adm	1,00	0,00	0,00	0,05	K.adm	1,00	0,06	0,12	0,47	K.adm	0,03	0,01	0,08	0,06	<b>0,18</b>	0,04456
K.tek	98784,00	1,00	0,00	8,40	K.tek	17,73	1,00	0,13	1,70	K.tek	0,61	0,11	0,09	0,20	<b>1,00</b>	0,2502
K.fin	4939,20	3600,00	1,00	864,00	K.fin	8,38	7,75	1,00	5,42	K.fin	0,29	0,83	0,70	0,63	<b>2,44</b>	0,61065
k.pub	19,60	0,12	0,00	1,00	k.pub	2,10	0,58	0,18	1,00	k.pub	0,07	0,06	0,13	0,12	<b>0,38</b>	0,09459
<b>Jumlah</b>	<b>103743,80</b>	<b>3601,12</b>	<b>1,00</b>	<b>873,45</b>	<b>Jumlah</b>	<b>29,22</b>	<b>9,39</b>	<b>1,43</b>	<b>8,60</b>	<b>Jumlah</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	

Matriks Perbandingan							
C	K.adm	K.tek	K.fin	K.pub	PV	HK	HK/PV
K.adm	1,00	0,06	0,12	0,47	0,04	0,1705	4,2625
K.tek	17,73	1,00	0,13	1,70	0,25	1,1915	4,766
K.fin	8,39	7,75	1,00	5,42	0,61	3,3709	5,52607
k.pub	2,10	0,58	0,18	1,00	0,09	0,4288	4,76444
<b>Jumlah</b>	<b>29,22</b>	<b>9,39</b>	<b>1,43</b>	<b>8,59</b>			
<b>Imax</b>	<b>4,829753</b>	$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \quad CR = \frac{CI}{RI}$ $RI = \frac{1.98(n - 2)}{n}$					
CI	0,28						
RI	0,9						
CR	0,31						



Kriteria terhadap Subkriteria

Responden 1						Responden 2						Responden 3					
Kriteria Administrasi			Kriteria Teknis			Kriteria Administrasi			Kriteria Teknis			Kriteria Administrasi			Kriteria Teknis		
SC	Otoritas pemerintah	Imp. Regulasi	SC	Efektivitas	Daya Saing Komoditas	SC	Otoritas pemerintah	Imp. Regulasi	SC	Efektivitas	Daya Saing Komoditas	SC	Otoritas pemerintah	Imp. Regulasi	SC	Efektivitas	Daya Saing Komoditas
Otoritas pemerintah	1,00	7,00	Efektivitas	1,00	0,14	Otoritas pemerintah	1,00	0,14	Efektivitas	1,00	0,17	Otoritas pemerintah	1,00	0,17	Efektivitas	1,00	0,17
Imp. Regulasi	0,14	1,00	Daya Saing Komoditas	7,00	1,00	Imp. Regulasi	7,00	1,00	Daya Saing Komoditas	6,00	1,00	Imp. Regulasi	6,00	1,00	Daya Saing Komoditas	6,00	1,00
Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial			Kriteria Kepentingan Publik			Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial			Kriteria Kepentingan Publik			Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial			Kriteria Kepentingan Publik		
SC	Efisiensi Biaya	Pendapatan Daerah	SC	Kesejahteraan	Pemerataan Pemb. Ekonomi	SC	Efisiensi Biaya	Pendapatan Daerah	SC	Kesejahteraan	Pemerataan Pemb. Ekonomi	SC	Efisiensi Biaya	Pendapatan Daerah	SC	Kesejahteraan	Pemerataan Pemb. Ekonomi
Efisiensi Biaya	1,00	8,00	Kesejahteraan	1,00	7,00	Efisiensi Biaya	1,00	6,00	Kesejahteraan	1,00	0,20	Efisiensi Biaya	1,00	7,00	Kesejahteraan	1,00	6,00
Pendapatan Daerah	0,13	1,00	Pemerataan Pemb. Ekonomi	0,14	1,00	Pendapatan Daerah	0,17	1,00	Pemerataan Pemb. Ekonomi	5,00	1,00	Pendapatan Daerah	0,14	1,00	Pemerataan Pemb. Ekonomi	0,17	1,00

Responden 4						Responden 5						Responden 6					
Kriteria Administrasi			Kriteria Teknis			Kriteria Administrasi			Kriteria Teknis			Kriteria Administrasi			Kriteria Teknis		
SC	Otoritas pemerintah	Imp. Regulasi	SC	Efektivitas	Daya Saing Komoditas	SC	Otoritas pemerintah	Imp. Regulasi	SC	Efektivitas	Daya Saing Komoditas	SC	Otoritas pemerintah	Imp. Regulasi	SC	Efektivitas	Daya Saing Komoditas
Otoritas pemerintah	1,00	0,14	Efektivitas	1,00	0,17	Otoritas pemerintah	1,00	0,20	Efektivitas	1,00	3,00	Otoritas pemerintah	1,00	0,14	Efektivitas	1,00	4,00
Imp. Regulasi	7,00	1,00	Daya Saing Komoditas	6,00	1,00	Imp. Regulasi	5,00	1,00	Daya Saing Komoditas	0,33	1,00	Imp. Regulasi	7,00	1,00	Daya Saing Komoditas	0,25	1,00
Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial			Kriteria Kepentingan Publik			Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial			Kriteria Kepentingan Publik			Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial			Kriteria Kepentingan Publik		
SC	Efisiensi Biaya	Pendapatan Daerah	SC	Kesejahteraan	Pemerataan Pemb. Ekonomi	SC	Efisiensi Biaya	Pendapatan Daerah	SC	Kesejahteraan	Pemerataan Pemb. Ekonomi	SC	Efisiensi Biaya	Pendapatan Daerah	SC	Kesejahteraan	Pemerataan Pemb. Ekonomi
Efisiensi Biaya	1,00	7,00	Kesejahteraan	1,00	0,17	Efisiensi Biaya	1,00	5,00	Kesejahteraan	1,00	3,00	Efisiensi Biaya	1,00	0,17	Kesejahteraan	1,00	0,14
Pendapatan Daerah	0,14	1,00	Pemerataan Pemb. Ekonomi	6,00	1,00	Pendapatan Daerah	0,20	1,00	Pemerataan Pemb. Ekonomi	0,33	1,00	Pendapatan Daerah	6,00	1,00	Pemerataan Pemb. Ekonomi	7,00	1,00

Responden 7						Responden 8						Responden 9						Responden 10					
Kriteria Administrasi			Kriteria Teknis			Kriteria Administrasi			Kriteria Teknis			Kriteria Administrasi			Kriteria Teknis			Kriteria Administrasi			Kriteria Teknis		
SC	Ot	Imp	SC	Ef	Da	SC	Ot	Imp	SC	Ef	Da	SC	Ot	Imp	SC	Ef	Da	SC	Ot	Imp	SC	Ef	Da
Ot	1,00	0,20	Ef	1,00	5,00	Ot	1,00	1,00	Ef	1,00	7,00	Ot	1,00	0,20	Ef	1,00	3,00	Ot	1,00	0,50	Ef	1,00	0,20
Im	5,00	1,00	Da	0,20	1,00	Imp	1,00	1,00	Da	0,14	1,00	Imp	5,00	1,00	Da	0,33	1,00	Imp	2,00	1,00	Da	5,00	1,00
Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial			Kriteria Kepentingan Publik			Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial			Kriteria Kepentingan Publik			Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial			Kriteria Kepentingan Publik			Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial			Kriteria Kepentingan Publik		
SC	Ot	Imp	SC	Ef	Da	SC	Ot	Imp	SC	Ef	Da	SC	Ot	Imp	SC	Ef	Da	SC	Ot	Imp	SC	Ef	Da
Ef	1,00	0,25	Kes	1,00	5,00	Ef	1,00	7,00	Kes	1,00	7,00	Ef	1,00	0,25	Kes	1,00	4,00	Ef	1,00	0,50	Kes	1,00	1,00
Da	4,00	1,00	Pem	0,20	1,00	Da	0,14	1,00	Pem	0,14	1,00	Da	4,00	1,00	Pem	0,25	1,00	Da	2,00	1,00	Pem	1,00	1,00

Hasil Kali						Matriks Perbandingan Berpasangan					
Kriteria Administrasi			Kriteria Teknis			Kriteria Administrasi			Kriteria Teknis		
SC	Otoritas pemerintah	Imp. Regulasi	SC	Efektivitas	Daya Saing Komoditas	SC	Otoritas pemerintah	Imp. Regulasi	SC	Efektivitas	Daya Saing Komoditas
Otoritas pemerintah	1,000000	0,000014	Efektivitas	1,000000	0,166667	Otoritas pemerintah	1,000000	0,003689	Efektivitas	1,00	0,41
Imp. Regulasi	73500	1,000000	Daya Saing Komoditas	6,000000	1,000000	Imp. Regulasi	271,108834	1,000000	Daya Saing Komoditas	2,45	1,00
Jumlah	73501,00	1,00	Jumlah	7,00	1,17	Jumlah	272,108834	1,003689	Jumlah	3,45	1,41
Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial			Kriteria Kepentingan Publik			Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial			Kriteria Kepentingan Publik		
SC	Efisiensi Biaya	Pendapatan Daerah	SC	Kesejahteraan	Pemerataan Pemb. Ekonomi	SC	Efisiensi Biaya	Pendapatan Daerah	SC	Kesejahteraan	Pemerataan Pemb. Ekonomi
Efisiensi Biaya	1,000000	428,750000	Kesejahteraan	1,000000	84,000	Efisiensi Biaya	1,00	20,71	Kesejahteraan	1,00	9,17
Pendapatan Daerah	0,002332	1,000000	Pemerataan Pemb. Ekonomi	0,011905	1,000000	Pendapatan Daerah	0,05	1,00	Pemerataan Pemb. Ekonomi	0,11	1,00
Jumlah	1,00	429,75	Jumlah	1,01	85,00	Jumlah	1,05	21,71	Jumlah	1,11	10,17

Normalisasi									
Kriteria Administrasi					Kriteria Teknis				
SC	Otoritas pemerintah	Imp. Regulasi	Jumlah	PV	SC	Efektivitas	Daya Saing Komoditas	Jumlah	PV
Otoritas pemerintah	0,003675	0,003675	0,007350	0,003675	Efektivitas	0,29	0,29	0,58	0,2899
Imp. Regulasi	0,996325	0,996325	1,992650	0,996325	Daya Saing Komoditas	0,71	0,71	1,42	0,7101
Jumlah	1,00	1,00	2,000000		Jumlah	1,00	1,00	2,00	
Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial					Kriteria Kepentingan Publik				
SC	Efisiensi Biaya	Pendapatan Daerah	Jumlah	PV	SC	Kesejahteraan	Pemerataan Pemb. Ekonomi	Jumlah	PV
Efisiensi Biaya	0,95	0,95	1,91	0,953930382	Kesejahteraan	0,90	0,90	1,80	0,90162
Pendapatan Daerah	0,05	0,05	0,09	0,046069618	Pemerataan Pemb. Ekonomi	0,10	0,10	0,20	0,09838
Jumlah	1,00	1,00	2,00		Jumlah	1,00	1,00	2,00	



Matriks Berpasangan													
Kriteria Administrasi						Kriteria Teknis							
SC	Oto	Imp.	PV	HK	HK/PV	SC	Efek	Daya	PV	HK	HK/PV		
Oto	1,00	0,003	0,003	0,007	2,00	Efek	1,00	0,41	0,2899	0,58	2,00		
Imp.	271,10	1,00	0,99	1,99	2	Daya	2,45	1,00	0,7101	1,42	2,000208076		
Jumlah	272,10	1,003				Jumlah	3,45	1,41					
Imax	2,000060 244					Imax	2,002 24955 4						
CI	0,000062 44					CI	0,002 2496						
RI	0					RI	0						
CR	0,000000					CR	0,000 000						
Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial						Kriteria Kepentingan Publik							
SC	Efis	Pend	PV	HK	HK/PV	SC	Kese	Pem	PV	HK	HK/PV		
Efi	1,00	20,71	0,95	1,90	2,00	Kese	1,00	9,17	0,90	1,80	2,000528824		
Pend	0,05	1,00	0,04	0,09	2,03	Pem	0,11	1,00	0,09	0,19	2,008166857		
Jumlah	1,05	21,71				Jumlah	1,11	10,17					
Imax	2,017746 827					Imax	2,004 34784 1						
CI	0,017746 827					CI	0,004 3478						
RI	0					RI	0						
CR	0,000000					CR	0,000 000						

## PRIORITY VECTOR

Sub Kriteria terhadap Kriteria			K.Administratif	PV		K.Teknis	PV		K.Finansial & Ekonomi	PV		K.Publik	PV
C	PV		0,04			0,25			0,61			0,09	
Administratif	0,04	Otor	0,003675	0,000147	Efek	0,2898979	0,072474	Efi	0,95393038	0,581898	Kes	0,9016247	0,081146
Teknis	0,25	Imp	0,996325	0,039853	Daya	0,7101021	0,177526	Pend	0,04606962	0,028102	Pe	0,0983753	0,008854
Ekonomi dan Finansial	0,61												
Kepentingan Publik	0,09												

Alternatif terhadap Subkriteria

Responden 1															
Otoritas Pemerintah				Implementasi Regulasi				Efektivitas				Daya Saing Komoditas			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1	7	6	Kerjasma Antar Daerah	1,00	9,00	7,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	8,00	7,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	7,00
Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1	7	Penguatan Fis. dan Mon.	0,11	1,00	8,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,12	1,00	7,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	8,00
Pelayanan Publik	0,16	0,14	1	Pelayanan Publik	0,14	0,12	1,00	Pelayanan Publik	0,14	0,14	1,00	Pelayanan Publik	0,14	0,12	1,00
Efisiensi Biaya				Pendapatan Daerah				Kesejahteraan				Pemerataan Pembangunan Ekonomi			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1	8	6	Kerjasma Antar Daerah	1,00	9,00	8,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	8,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	8,00	8,00
Penguatan Fis. dan Mon.	0,12	1	0,12	Penguatan Fis. dan Mon.	0,11	1,00	0,12	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,12	Penguatan Fis. dan Mon.	0,12	1,00	0,14
Pelayanan Publik	0,16	8	1	Pelayanan Publik	0,12	8,00	1,00	Pelayanan Publik	0,12	8,00	1,00	Pelayanan Publik	0,12	7,00	1,00

Responden 2															
Otoritas Pemerintah				Implementasi Regulasi				Efektivitas				Daya Saing Komoditas			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	1,00	6,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	1,00	6,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	7,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	6,00	6,00
Penguatan Fis. dan Mon.	1,00	1,00	0,16	Penguatan Fis. dan Mon.	1,00	1,00	7,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,16	Penguatan Fis. dan Mon.	0,16	1,00	7,00
Pelayanan Publik	0,16	6,00	1,00	Pelayanan Publik	0,16	0,14	1,00	Pelayanan Publik	0,14	6,00	1,00	Pelayanan Publik	0,16	0,14	1,00
Efisiensi Biaya				Pendapatan Daerah				Kesejahteraan				Pemerataan Pembangunan Ekonomi			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	6,00	6,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	6,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	8,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	6,00
Penguatan Fis. dan Mon.	0,16	1,00	6,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	7,00
Pelayanan Publik	0,16	0,16	1,00	Pelayanan Publik	0,16	7,00	1,00	Pelayanan Publik	0,12	7,00	1,00	Pelayanan Publik	0,16	0,14	1,00

Responden 3															
Otoritas Pemerintah				Implementasi Regulasi				Efektivitas				Daya Saing Komoditas			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,16	7,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	7,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	6,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	5,00
Penguatan Fis. dan Mon.	6,00	1,00	6,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,16	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14
Pelayanan Publik	0,14	0,16	1,00	Pelayanan Publik	0,14	6,00	1,00	Pelayanan Publik	0,16	7,00	1,00	Pelayanan Publik	0,20	7,00	1,00
Efisiensi Biaya				Pendapatan Daerah				Kesejahteraan				Pemerataan Pembangunan Ekonomi			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	6,00	6,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	6,00	5,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	0,14	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	7,00
Penguatan Fis. dan Mon.	0,16	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	0,16	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14
Pelayanan Publik	0,16	7,00	1,00	Pelayanan Publik	0,20	7,00	1,00	Pelayanan Publik	7,00	7,00	1,00	Pelayanan Publik	0,14	7,00	1,00



Responden 4															
Otoritas Pemerintah				Implementasi Regulasi				Efektivitas				Daya Saing Komoditas			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	6,00	7,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	8,00	6,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	8,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	6,00
Penguatan Fis. dan Mon.	0,16	1,00	0,16	Penguatan Fis. dan Mon.	0,12	1,00	7,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14
Pelayanan Publik	0,14	6,00	1,00	Pelayanan Publik	0,16	0,14	1,00	Pelayanan Publik	0,12	7,00	1,00	Pelayanan Publik	0,16	7,00	1,00
Efisiensi Biaya				Pendapatan Daerah				Kesejahteraan				Pemerataan Pembangunan Ekonomi			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	8,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	8,00	7,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	8,00	7,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	7,00
Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,12	Penguatan Fis. dan Mon.	0,12	1,00	0,12	Penguatan Fis. dan Mon.	0,12	1,00	8,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14
Pelayanan Publik	0,12	8,00	1,00	Pelayanan Publik	0,14	8,00	1,00	Pelayanan Publik	0,14	0,12	1,00	Pelayanan Publik	0,14	7,00	1,00

<b>Responden 5</b>															
Otoritas Pemerintah				Implementasi Regulasi				Efektivitas				Daya Saing Komoditas			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	9,00	0,20	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	0,20	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	0,14	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	0,20
Penguatan Fis. dan Mon.	0,11	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14
Pelayanan Publik	5,00	7,00	1,00	Pelayanan Publik	5,00	7,00	1,00	Pelayanan Publik	7,00	7,00	1,00	Pelayanan Publik	5,00	7,00	1,00
Efisiensi Biaya				Pendapatan Daerah				Kesejahteraan				Pemerataan Pembangunan Ekonomi			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	0,20	Kerjasma Antar Daerah	1,00	5,00	0,33	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	0,20	Kerjasma Antar Daerah	1,00	7,00	0,20
Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	0,20	1,00	0,33	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	0,14	1,00	0,11
Pelayanan Publik	5,00	7,00	1,00	Pelayanan Publik	3,00	3,00	1,00	Pelayanan Publik	5,00	7,00	1,00	Pelayanan Publik	5,00	9,00	1,00

Responden 6															
Otoritas Pemerintah				Implementasi Regulasi				Efektivitas				Daya Saing Komoditas			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1	0,25	0,2	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,20	0,12	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,25	0,14	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,50	0,25
Penguatan Fis. dan Mon.	4	1	0,16	Penguatan Fis. dan Mon.	5,00	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	4,00	1,00	0,12	Penguatan Fis. dan Mon.	2,00	1,00	0,20
Pelayanan Publik	5	6	1	Pelayanan Publik	8,00	7,00	1,00	Pelayanan Publik	7,00	8,00	1,00	Pelayanan Publik	4,00	5,00	1,00
Efisiensi Biaya				Pendapatan Daerah				Kesejahteraan				Pemerataan Pembangunan Ekonomi			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1	1	0,14	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,25	0,14	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,25	0,14	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,25	0,14
Penguatan Fis. dan Mon.	1	1	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	4,00	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	4,00	1,00	0,14	Penguatan Fis. dan Mon.	4,00	1,00	0,14
Pelayanan Publik	7	7	1	Pelayanan Publik	7,00	7,00	1,00	Pelayanan Publik	7,00	7,00	1,00	Pelayanan Publik	7,00	7,00	1,00

Responden 7															
Otoritas Pemerintah				Implementasi Regulasi				Efektivitas				Daya Saing Komoditas			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,33	3,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	3,00	3,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	3,00	3,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	3,00	3,00
Penguatan Fis. dan Mon.	3,00	1,00	3,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,33	1,00	1,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,33	1,00	0,50	Penguatan Fis. dan Mon.	0,33	1,00	2,00
Pelayanan Publik	0,33	0,33	1,00	Pelayanan Publik	0,33	1,00	1,00	Pelayanan Publik	0,33	2,00	1,00	Pelayanan Publik	0,33	0,50	1,00
Efisiensi Biaya				Pendapatan Daerah				Kesejahteraan				Pemerataan Pembangunan Ekonomi			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	5,00	5,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,33	3,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,33	0,33	Kerjasma Antar Daerah	1,00	3,00	3,00
Penguatan Fis. dan Mon.	0,20	1,00	3,00	Penguatan Fis. dan Mon.	3,00	1,00	2,00	Penguatan Fis. dan Mon.	3,00	1,00	0,33	Penguatan Fis. dan Mon.	0,33	1,00	3,00
Pelayanan Publik	0,20	0,33	1,00	Pelayanan Publik	0,33	0,50	1,00	Pelayanan Publik	3,00	3,00	1,00	Pelayanan Publik	0,33	0,33	1,00

Responden 8															
Otoritas Pemerintah				Implementasi Regulasi				Efektivitas				Daya Saing Komoditas			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	4,00	5,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	3,00	3,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,25	0,25	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,25	0,20
Penguatan Fis. dan Mon.	0,25	1,00	5,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,33	1,00	4,00	Penguatan Fis. dan Mon.	4,00	1,00	0,25	Penguatan Fis. dan Mon.	4,00	1,00	3,00
Pelayanan Publik	0,20	0,20	1,00	Pelayanan Publik	0,33	0,25	1,00	Pelayanan Publik	4,00	4,00	1,00	Pelayanan Publik	5,00	0,33	1,00
Efisiensi Biaya				Pendapatan Daerah				Kesejahteraan				Pemerataan Pembangunan Ekonomi			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	2,00	4,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	5,00	5,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	2,00	0,50	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,20	0,20
Penguatan Fis. dan Mon.	0,50	1,00	3,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,20	1,00	4,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,50	1,00	2,00	Penguatan Fis. dan Mon.	5,00	1,00	0,50
Pelayanan Publik	0,25	0,33	1,00	Pelayanan Publik	0,20	0,25	1,00	Pelayanan Publik	2,00	0,50	1,00	Pelayanan Publik	5,00	2,00	1,00

Responden 9															
Otoritas Pemerintah				Implementasi Regulasi				Efektivitas				Daya Saing Komoditas			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,33	0,50	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,25	0,25	Kerjasma Antar Daerah	1,00	2,00	4,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	2,00	2,00
Penguatan Fis. dan Mon.	3,00	1,00	2,00	Penguatan Fis. dan Mon.	4,00	1,00	0,25	Penguatan Fis. dan Mon.	0,50	1,00	4,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,50	1,00	0,33
Pelayanan Publik	2,00	0,50	1,00	Pelayanan Publik	4,00	4,00	1,00	Pelayanan Publik	0,25	0,25	1,00	Pelayanan Publik	0,50	3,00	1,00
Efisiensi Biaya				Pendapatan Daerah				Kesejahteraan				Pemerataan Pembangunan Ekonomi			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	2,00	4,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,25	5,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	4,00	3,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,50	4,00
Penguatan Fis. dan Mon.	0,50	1,00	3,00	Penguatan Fis. dan Mon.	4,00	1,00	0,33	Penguatan Fis. dan Mon.	0,25	1,00	0,25	Penguatan Fis. dan Mon.	2,00	1,00	0,25
Pelayanan Publik	0,25	0,33	1,00	Pelayanan Publik	0,20	3,00	1,00	Pelayanan Publik	0,33	4,00	1,00	Pelayanan Publik	0,25	4,00	1,00



Responden 10															
Otoritas Pemerintah				Implementasi Regulasi				Efektivitas				Daya Saing Komoditas			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	5,00	5,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	5,00	3,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,33	0,25	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,33	2,00
Penguatan Fis. dan Mon.	0,20	1,00	5,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,20	1,00	4,00	Penguatan Fis. dan Mon.	3,00	1,00	0,25	Penguatan Fis. dan Mon.	3,00	1,00	3,00
Pelayanan Publik	0,20	0,20	1,00	Pelayanan Publik	0,33	0,25	1,00	Pelayanan Publik	4,00	4,00	1,00	Pelayanan Publik	0,50	0,33	1,00
Efisiensi Biaya				Pendapatan Daerah				Kesejahteraan				Pemerataan Pembangunan Ekonomi			
ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasma Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasma Antar Daerah	1,00	3,00	3,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,50	4,00	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,33	0,50	Kerjasma Antar Daerah	1,00	0,33	0,25
Penguatan Fis. dan Mon.	0,33	1,00	3,00	Penguatan Fis. dan Mon.	2,00	1,00	0,33	Penguatan Fis. dan Mon.	3,00	1,00	0,33	Penguatan Fis. dan Mon.	3,00	1,00	0,20
Pelayanan Publik	0,33	0,33	1,00	Pelayanan Publik	0,25	3,00	1,00	Pelayanan Publik	2,00	3,00	1,00	Pelayanan Publik	4,00	5,00	1,00

Hasil Kali															
Otoritas Pemerintah				Implementasi Regulasi				Efektivitas				Daya Saing Komoditas			
ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasama Antar Daerah	1	32,93136	2646	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	7938,000000	285,768000	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	2376,990000	34,574400	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	3565,485000	151,200000
Penguatan Fis. dan Mon.	0,0266112	1	3,612672	Penguatan Fis. dan Mon.	0,000113	1,000000	4,917248	Penguatan Fis. dan Mon.	0,000365	1,000000	0,000046	Penguatan Fis. dan Mon.	0,000243	1,000000	0,182553
Pelayanan Publik	0,000331162	0,22353408	1	Pelayanan Publik	0,002885	0,172872	1,000000	Pelayanan Publik	0,024340	18439,680000	1,000000	Pelayanan Publik	0,005914	4,706440	1,000000
Efisiensi Biaya				Pendapatan Daerah				Kesejahteraan				Pemerataan Pembangunan Ekonomi			
ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasama Antar Daerah	1	846720	11612,16	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	779,625000	23284,800000	Kerjasama Antar Daerah	1,00	4183,50	0,43	Kerjasama Antar Daerah	1,00	475,40	39,51
Penguatan Fis. dan Mon.	9,93485E-07	1	0,01920361	Penguatan Fis. dan Mon.	0,001135	1,000000	0,000011	Penguatan Fis. dan Mon.	0,00	1,00	0,00	Penguatan Fis. dan Mon.	0,00	1,00	0,00
Pelayanan Publik	7,09632E-05	41,65334047	1	Pelayanan Publik	0,000037	74088,000000	1,000000	Pelayanan Publik	1,96	41489,28	1,00	Pelayanan Publik	0,02	39933,43	1,00

<b>Matriks Perbandingan Berpasangan</b>															
Otoritas Pemerintah				Implementasi Regulasi				Efektivitas				Daya Saing Komoditas			
ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasama Antar Daerah	1	3,205308896	13,831309	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	19,948199	6,586750	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	13,345734	3,257753	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	15,277051	5,327424
Penguatan Fis. dan Mon.	0,298553032	1	1,534415	Penguatan Fis. dan Mon.	0,048303	1,000000	1,700490	Penguatan Fis. dan Mon.	0,071473	1,000000	0,035856	Penguatan Fis. dan Mon.	0,062437	1,000000	0,567278
Pelayanan Publik	0,06918522	0,606896428	1	Pelayanan Publik	0,142359	0,557068	1,000000	Pelayanan Publik	0,289807	26,419086	1,000000	Pelayanan Publik	0,180836	1,675833	1,000000
Jumlah	1,367738252	4,812205324	16,365724	Jumlah	1,190662	21,505267	9,287240	Jumlah	1,361280	40,764820	4,293610	Jumlah	1,243273	17,952885	6,894702
Efisiensi Biaya				Pendapatan Daerah				Kesejahteraan				Pemerataan Pembangunan Ekonomi			
ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasama Antar Daerah	1	94,60482196	22,644931	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	9,203689	28,555570	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	16,113134	0,757495	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	7,804632	3,406033
Penguatan Fis. dan Mon.	0,009978235	1	0,26779	Penguatan Fis. dan Mon.	0,104324	1,000000	0,022480	Penguatan Fis. dan Mon.	0,059197	1,000000	0,027181	Penguatan Fis. dan Mon.	0,122216	1,000000	0,028099
Pelayanan Publik	0,041401022	3,466436738	1	Pelayanan Publik	0,033399	42,000000	1,000000	Pelayanan Publik	1,250597	34,618797	1,000000	Pelayanan Publik	0,279064	34,180537	1,000000
Jumlah	1,051379257	99,07125869	23,912721	Jumlah	1,137723	52,203689	29,578050	Jumlah	2,309794	51,731930	1,784676	Jumlah	1,401280	42,985169	4,434132

Normalisasi																		
Otoritas Pemerintah					Implementasi Regulasi					Efektivitas					Daya Saing Komoditas			
ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasama Antar Daerah	0,731134045	0,666078997	0,8451388	0,747451	Kerjasama Antar Daerah	0,839869	0,927596	0,709226	0,825564	Kerjasama Antar Daerah	0,734603	0,327384	0,758745	0,606910	Kerjasama Antar Daerah	0,804329	0,850952	0,772684
Penguatan Fis. dan Mon.	0,218282286	0,207804932	0,0937578	0,173282	Penguatan Fis. dan Mon.	0,040568	0,046500	0,183100	0,090056	Penguatan Fis. dan Mon.	0,052504	0,024531	0,008351	0,028462	Penguatan Fis. dan Mon.	0,050220	0,055701	0,082277
Pelayanan Publik	0,050583669	0,126116071	0,0611033	0,079268	Pelayanan Publik	0,119563	0,025904	0,107675	0,084381	Pelayanan Publik	0,212893	0,648085	0,232904	0,364628	Pelayanan Publik	0,145451	0,093346	0,145039
Jumlah	1	1	1		Jumlah	1,000000	1,000000	1,000000		Jumlah	1,000000	1,000000	1,000000		Jumlah	1,000000	1,000000	1,000000
Efisiensi Biaya					Pendapatan Daerah					Kesejahteraan					Pemerataan Pembangunan Ekonomi			
ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik
Kerjasama Antar Daerah	0,951131566	0,954916928	0,9469826	0,95101	Kerjasama Antar Daerah	0,878949	0,176303	0,965431	0,673561	Kerjasama Antar Daerah	0,432939	0,311474	0,424444	0,389619	Kerjasama Antar Daerah	0,713633	0,181566	0,768140
Penguatan Fis. dan Mon.	0,009490615	0,010093745	0,0111986	0,010261	Penguatan Fis. dan Mon.	0,091695	0,019156	0,000760	0,037204	Penguatan Fis. dan Mon.	0,025629	0,019330	0,015230	0,020063	Penguatan Fis. dan Mon.	0,087218	0,023264	0,006337
Pelayanan Publik	0,039377819	0,034989328	0,0418187	0,038729	Pelayanan Publik	0,029356	0,804541	0,033809	0,289235	Pelayanan Publik	0,541432	0,669196	0,560326	0,590318	Pelayanan Publik	0,199149	0,795170	0,225523
Jumlah	1	1	1		Jumlah	1,000000	1,000000	1,000000		Jumlah	1,000000	1,000000	1,000000		Jumlah	1,000000	1,000000	1,000000

### Matriks Berpasangan

Otoritas Pemerintah							Implementasi Regulasi						
ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	HK	HK/PV	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	HK	HK/PV
Kerjasama Antar Daerah	1	3,205308896	13,831309	0,747451	2,399247805	3,20990808	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	19,948199	6,586750	0,825563521	3,177811105	3,84926299
Penguatan Fis. dan Mon.	0,298553032	1	1,534415	0,173282	0,518064867	2,98972657	Penguatan Fis. dan Mon.	0,048303	1,000000	1,700490	0,090055956	0,273421236	3,03612609
Pelayanan Publik	0,06918522	0,606896428	1	0,079268	0,236144259	2,97907347	Pelayanan Publik	0,142359	0,557068	1,000000	0,084380523	0,252074488	2,98735393
Jumlah	1,367738252	4,812205324	16,365724				Jumlah	1,190662	21,505267	9,287240			
LMAX	3,059569373						LMAX	3,290914333					
CI	0,029784687						CI	0,145457167					
RI	0,0						RI	0,0					
CR	0,0						CR	0,0					

Efektivitas							Daya Saing Komoditas						
ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	HK	HK/PV	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	HK	HK/PV
Kerjasama Antar Daerah	1,000000	13,345734	3,257753	0,6069104	2,17462352	3,583104842	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	15,277051	5,327424	0,80932164	2,44931509	3,02638
Penguatan Fis. dan Mon.	0,071473	1,000000	0,035856	0,028462	0,084913621	2,98340348	Penguatan Fis. dan Mon.	0,062437	1,000000	0,567278	0,0627329	0,18584525	2,962485
Pelayanan Publik	0,289807	26,419086	1,000000	0,3646276	1,292454551	3,544587597	Pelayanan Publik	0,180836	1,675833	1,000000	0,12794546	0,37942953	2,965557
Jumlah	1,361280	40,764820	4,293610				Jumlah	1,243273	17,952885	6,894702			
LMAX	3,370365306						LMAX	2,98480725					
CI	0,185182653						CI	-0,00759638					
RI	0						RI	0					
CR	0						CR	0					



Efisiensi Biaya							Pendapatan Daerah						
ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	HK	HK/PV	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	HK	HK/PV
Kerjasama Antar Daerah	1	94,60482196	22,644931	0,95101	2,798757611	2,942930699	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	9,203689	28,555570	0,673561079	9,275248184	13,7704634
Penguatan Fis. dan Mon.	0,009978235	1	0,26779	0,010261	0,030121544	2,935536889	Penguatan Fis. dan Mon.	0,104324	1,000000	0,022480	0,037203743	0,113974309	3,06351728
Pelayanan Publik	0,041401022	3,466436738	1	0,038729	0,113670539	2,935051839	Pelayanan Publik	0,033399	42,000000	1,000000	0,289235178	1,874288512	6,48015406
Jumlah	1,051379257	99,07125869	23,912721				Jumlah	1,137723	52,203689	29,578050			
LMAX	2,937839809						LMAX	7,771378243					
CI	0,031080096						CI	2,385689122					
RI	0						RI	0					
CR	0						CR	0					

Kesejahteraan							Pemerataan Pembangunan Ekonomi						
ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	HK	HK/PV	ALT	Kerjasama Antar Daerah	Penguatan Fis. dan Mon.	Pelayanan Publik	PV	HK	HK/PV
Kerjasama Antar Daerah	1,000000	16,113134	0,757495	0,3896189	1,160061191	2,97742519	Kerjasama Antar Daerah	1,000000	7,804632	3,406033	0,554446251	2,24329629	4,046012
Penguatan Fis. dan Mon.	0,059197	1,000000	0,027181	0,0200631	0,059172737	2,949332156	Penguatan Fis. dan Mon.	0,122216	1,000000	0,028099	0,038939491	0,1181273	3,033612
Pelayanan Publik	1,250597	34,618797	1,000000	0,590318	1,772134371	3,001999644	Pelayanan Publik	0,279064	34,180537	1,000000	0,406614258	1,89231269	4,653828
Jumlah	2,309794	51,731930	1,784676				Jumlah	1,401280	42,985169	4,434132			
LMAX	2,97625233						LMAX	3,91115058					
CI	0,011873835						CI	0,45557529					
RI	0						RI	0					
CR	0						CR	0					

## Perhitungan Akhir

	Kelayakan Administratif		Kelayakan Teknis		Kelayakan Ekonomi dan Finansial		Kepentingan Publik		Priority Ranking
	Otoritas Pemerintah	Implementasi Regulasi	Efektivitas	Daya Saing Komoditas	Efisiensi Biaya	Pendapatan Daerah	Kesejahteraan	Pemerataan Pemb. Ekonomi	
	0,000147	0,039853	0,072474	0,177526	0,581898	0,028102	0,081146	0,008854	
<b>Kerja Sama Antar Daerah</b>	0,74745063	0,825563521	0,60691038	0,80932164	0,95101	0,67356108	0,389618921	0,554446251	<b>0,829516</b>
Penguatan Fis. Dan Mon.	0,17328169	0,090055956	0,028462	0,0627329	0,010261	0,03720374	0,020063097	0,038939491	0,025803
Pelayanan Publik	0,07926769	0,084380523	0,36462762	0,12794546	0,038729	0,28923518	0,590317982	0,406614258	0,13468